



RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 – 2024





BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Magelang.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Peraturan Daerah.
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
23. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
24. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
25. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
31. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
32. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
33. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019-2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi:

- a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. acuan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Renstra Dinas Kesehatan;
- c. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
- d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- g. Renstra Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- k. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
- l. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- n. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- o. Renstra Dinas Perhubungan;
- p. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- r. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- t. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
- v. Renstra Sekretariat Daerah;
- w. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- x. Renstra Kecamatan Salaman;
- y. Renstra Kecamatan Borobudur;
- z. Renstra Kecamatan Ngluwar;
- aa. Renstra Kecamatan Salam;
- bb. Renstra Kecamatan Srumbung;
- cc. Renstra Kecamatan Dukun;
- dd. Renstra Kecamatan Sawangan;
- ee. Renstra Kecamatan Muntilan;
- ff. Renstra Kecamatan Mungkid;
- gg. Renstra Kecamatan Mertoyudan;
- hh. Renstra Kecamatan Tempuran;
- ii. Renstra Kecamatan Kajoran;
- jj. Renstra Kecamatan Kaliangkrik;
- kk. Renstra Kecamatan Bandongan;
- ll. Renstra Kecamatan Candimulyo;
- mm. Renstra Kecamatan Pakis;
- nn. Renstra Kecamatan Ngablak;
- oo. Renstra Kecamatan Grabag;

- pp. Renstra Kecamatan Tegalorejo;
 - qq. Renstra Kecamatan Secang;
 - rr. Renstra Kecamatan Windusari;
 - ss. Renstra Inspektorat;
 - tt. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - uu. Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - vv. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.
Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ir. TRIAGUNG SUCAHYONO

NIP : 19600625 198503 1 013

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

Berdasarkan SK Bupati Nomor : 180.182/308/KEP/20/2019 tanggal 18 September 2019. Bertugas untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Berkedudukan di Jalan Letnan Tukiyat, Kota Mungkid.

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. TRIAGUNG SUCAHYONO

Pemula Utama Muda

NIP. 19600625 198503 1 013



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/308 /KEP/20/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

ASISTEN EKBANG KESRA	KEPALA DISTAN DAN PANGAN	KABAG PREKON	KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- mengumpulkan data dan informasi;
 - menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
 - melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 September 2019



BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

ASISTEN EKBANG KESRA	KEPALA DISTAN DAN PANGAN	KABAG PREKON	KABAG HUKUM
<i>bo</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/308 /KEP/20/2019
 TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
 PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ir. TRI AGUNG SUCAHYONO	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Ketua	Dalam hal terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2	Ir. EKO WIDI HERMANTO	Plt. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan	Wakil Ketua	
3	NUR WAHYU HANDAYANI, S.P.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pertanian dan Pangan	Sekretaris	
4	WIDI ASTUTI, S.E., M.P.A.	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Pangan	Penanggung Jawab Teknis	
5	Ir. ROMZA ERNAWAN, M.Si.	Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
6	Ir. JOGA SUSILO	Kepala Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
7	Ir. PRATOMO SUBROTO	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
8	Ir. NIKEN ISMAYAWATI	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
9	Ir. PETRUS MUHARDI	Kepala Seksi Pengembangan SDM Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	

1	2	3	4	5
10	SUPARTOMO, S.P.	Kepala UPT Taman Anggrek pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
11	SRI YULIANI, S.P.	Kepala UPT Benih Tanaman Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
12	Ir. TITIK SRI WULANDARI	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
13	SUPANTI, S.P.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
14	Ir. TRI WARDoyo	Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
15	TUKIYA	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
16	ROKHMAD	Fungsional Umum pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	



BUPATI MAGELANG,

[Handwritten Signature]
 ZAENAL ARIFIN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra merupakan dasar penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang selama lima tahun. Renstra berfungsi pula sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang.

Akhir kata semoga dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini dapat bermanfaat. Dengan dukungan penuh dari segenap pelaku, pengguna dan pemangku kepentingan diharapkan Renstra ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Kota Mungkid, Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. TRI AGUNG SUCAHYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19600625 198503 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	II-11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	III-8
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-13
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	II-13
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	II-18
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ...	III-2
Tabel 3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati..	III-4
Tabel 3.3.	Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah	III-10
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-14
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
Tabel 6.1.	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	VI-4
Tabel 7.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	VII-2
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang	II-10
-----------	---	-------

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian di Indonesia memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Indonesia, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk.

Sejalan dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045, pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun ke depan (2015-2019) akan mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (*Agriculture for Development*) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Paradigma tersebut memberikan arah bahwa sektor pertanian mencakup berbagai kepentingan yang tidak saja untuk memenuhi kepentingan penyediaan pangan bagi masyarakat tetapi juga kepentingan yang luas dan multifungsi. Selain sebagai sektor utama yang menjadi tumpuan ketahanan pangan, sektor pertanian memiliki fungsi strategis lainnya termasuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan dan sosial (kemiskinan, keadilan dan lain-lain) serta fungsinya sebagai penyedia sarana wisata (agrowisata).

Tantangan yang dihadapi sektor pertanian saat ini antara lain berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan, kelembagaan petani yang masih lemah, adanya pasar bebas di era globalisasi, dan harga jual produk pertanian yang tidak menentu (*fluktuaktif*). Perencanaan yang strategis serta koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait diperlukan untuk mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh bidang pertanian dan pangan di Kabupaten Magelang.

Menurut Permendagri 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Pemerintah Daerah, Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati Magelang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang Pangan. Untuk mencapai sasaran tugas dan kewenangan yang diembannya, maka Distan dan Pangan Kabupaten Magelang mempunyai tujuan dan sasaran strategis, komprehensif, terpadu dan terarah. Renstra disusun sebagai dasar dan acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan kondisi kemampuan daerah.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang dihadapi Kabupaten Magelang, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Selain itu terdapat keterkaitan antara Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi dengan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Renstra ini kemudian dijabarkan dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai landasan pelaksanaan pencapaian target, program dan kegiatan tahunan.

1. 2. Landasan Hukum

Renstra SKPD Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
30. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 32);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);
45. Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
46. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

1. 3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran dan indikator kinerja pembangunan di bidang pertanian dan pangan, selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kementerian Pertanian.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan peran (tugas dan fungsi) Dinas dan Pangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan periode sebelumnya, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra pada periode ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, kemudian di telaah faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah. Faktor-faktor ini yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Distan dan Pangan akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, bersifat operasional dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Penentuan program

dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Distan dan Pangan Kabupaten Magelang, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator program yang telah dirumuskan pada Bab IV.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2.1.2. Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan, dan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pertanian dan Pangan;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 3 orang Kepala Sub Bagian serta 5 orang Kepala Bidang dan 15 orang Kepala Seksi, yang secara rinci mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan konsep program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan;
2. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
3. Mengkoordinasikan penyusunan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
4. Menyusun konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis internal dinas di bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP);
6. Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) atau sejenis;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Memfasilitasi perencanaan dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (non APBD).
9. Memfasilitasi pengelolaan pengaduan dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

10. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi bidang pertanian dan pangan;
11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan;
12. Menyusun laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pertanian dan Pangan;
13. Menyusun akuntabilitas program, kegiatan dan anggaran berkala dan tahunan;
14. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
15. Memfasilitasi perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan;
16. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Subbagian Program;
17. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran bidang tanaman pangan dan hortikultura;
2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan budidaya dan pasca panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura;

3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis budidaya serta pasca panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
4. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
5. Menyelenggarakan pembinaan penggunaan pupuk, pestisida, pemanfaatan lahan, perbenihan serta pembinaan budidaya tanaman dan pasca panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
6. Menyelenggarakan uji multilokasi varietas/klon, pemupukan, pemberian rekomendasi paket teknologi budidaya tanaman, dan Pasca panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura. Menyelenggarakan pengamatan, peramalan, kerjasama penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
7. Menyelenggarakan pengamatan, peramalan, kerja sama penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
8. Memfasilitasi standarisasi penggunaan pupuk dan pestisida komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
9. Menyelenggarakan pembinaan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pemasaran komoditi tanaman pangan dan hortikultura;
10. Melaksanakan administrasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
11. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan dan hortikultura.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perkebunan

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Perkebunan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Bidang Perkebunan;
2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan budidaya dan pasca panen komoditi tanaman perkebunan;
3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis budidaya serta pasca panen komoditi tanaman perkebunan;
4. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
5. Menyelenggarakan pembinaan penggunaan pupuk, pestisida, pemanfaatan lahan, perbenihan serta pembinaan budidaya tanaman dan pasca panen komoditi tanaman perkebunan;
6. Menyelenggarakan uji varietas/klon, kesuburan tanah dan pemupukan, pemberian rekomendasi paket teknologi budidaya tanaman, dan Pasca panen komoditi tanaman perkebunan;
7. Menyelenggarakan pengamatan, peramalan, kerjasama penanggulangan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
8. Mengoordinasikan penggunaan pupuk dan pestisida komoditi tanaman perkebunan;
9. Mengoordinasikan pembinaan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pemasaran komoditi tanaman perkebunan;
10. Melaksanakan administrasi di bidang perkebunan;
11. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup bidang perkebunan;
12. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup bidang perkebunan.

4. Bidang Sarana dan Prasarana

a. *Tugas Pokok :*

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang prasarana dan sarana pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. *Fungsi :*

1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan bidang prasarana dan sarana;
3. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan bidang prasarana dan sarana;
4. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
5. Menyelenggarakan pengelolaan lahan dan air serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penggunaan pupuk dan pestisida;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan pendayagunaan alat mesin dan pembiayaan pertanian;
8. Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana di sektor pertanian;
9. Melaksanakan administrasi di bidang prasarana dan sarana;
10. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian

a. *Tugas Pokok :*

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyuluhan dan SDM Pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian;
2. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan bidang penyuluhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian;
3. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
4. Menyelenggarakan penyuluhan pertanian;
5. Menyelenggarakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian;
6. Menyelenggaraan pembinaan kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan;
7. Menyelenggarakan promosi pertanian;
8. Melaksanakan administrasi di bidang penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian;
9. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Ketahanan Pangan

a. Tugas Pokok :

Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Fungsi :

1. Merumuskan program, kegiatan, rencana kerja dan anggaran Bidang Ketahanan Pangan;
2. Merumuskan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang ketahanan pangan;
3. Merumuskan kebijakan teknis dan rencana kegiatan penguatan ketahanan pangan;
4. Membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
5. Merumuskan analisis ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan pangan, keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Menyelenggarakan penanganan kerawanan pangan;
7. Melaksanakan pengawasan distribusi dan keamanan pangan;
8. Menyelenggarakan penganeekaragaman konsumsi pangan;
9. Mengembangkan distribusi, cadangan pangan, serta penganeekaragaman konsumsi pangan;
10. Menyelenggarakan kerjasama ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
11. Menyelenggarakan pembinaan ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan serta penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
12. Melaksanakan administrasi di Bidang Ketahanan Pangan;
13. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Ketahanan Pangan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 32) dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertanian dan

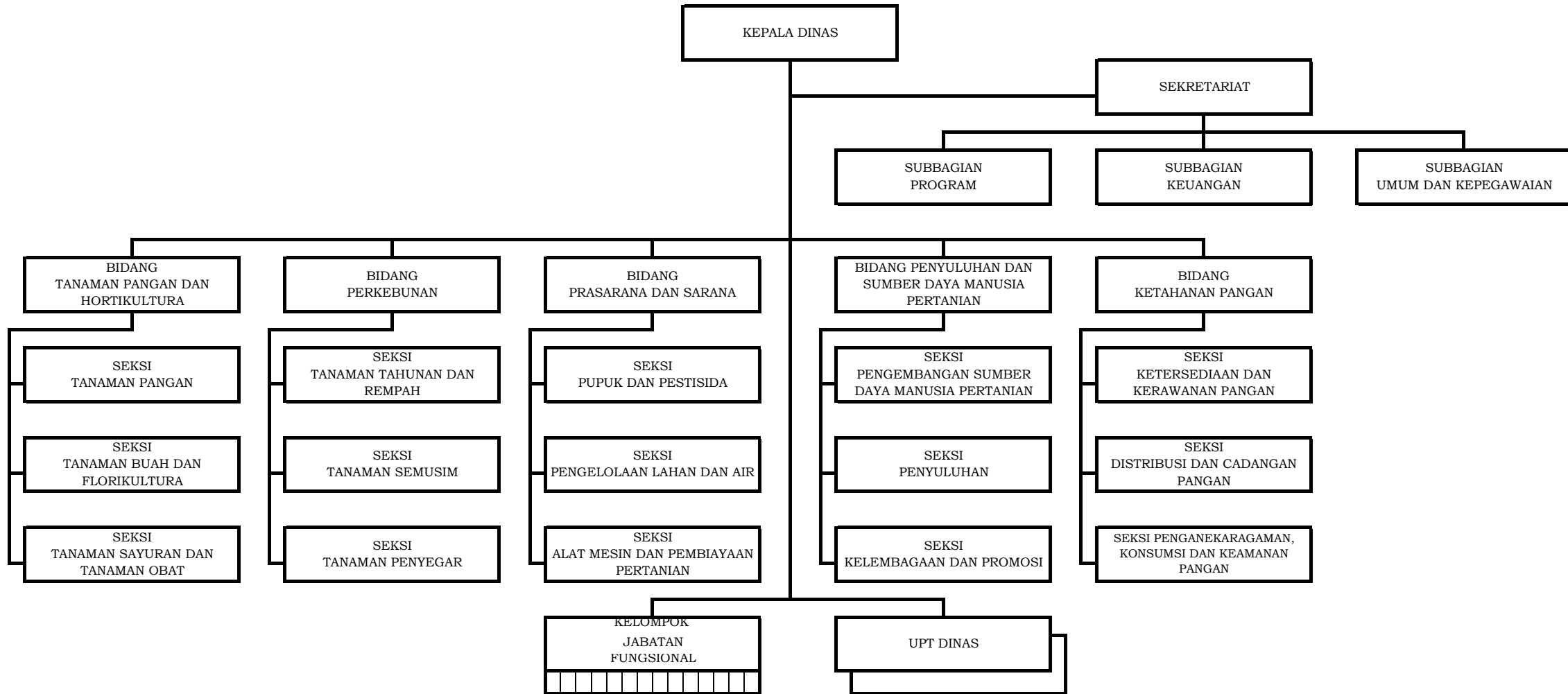
Pangan, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Pangan, (Distan dan Pangan) Kabupaten Magelang.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - 2.a. Sub Bagian Program
 - 2b. Sub Bagian Keuangan
 - 2c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi:
 - 3.a. Seksi Tanaman Pangan
 - 3.b. Seksi Tanaman Buah dan Florikultura
 - 3.c. Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
4. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 4.a. Seksi Tanaman Tahunan dan Rempah
 - 4.b. Seksi Tanaman Semusim
 - 4.c. Seksi Tanaman Penyegar
5. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
 - 5.a. Seksi Pupuk dan Pestisida
 - 5.b. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 - 5.c. Seksi Alat Mesin dan Pembiayaan
6. Bidang Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian, membawahi :
 - 6.a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 6.b. Seksi Penyuluhan
 - 6.c. Seksi Kelembagaan dan Promosi
7. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi :
 - 7.a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - 7.b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
 - 7.c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang seperti gambar di bawah ini :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG



Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang maka diperlukan ketersediaan sumber daya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan prasarana dan sarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Komposisi SDM Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan eselon sejumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 5 orang
 - Eselon IV : 19 orang
- b. Komposisi SDM Dinas Pertanian dan Pangan berdasarkan jabatan sejumlah 302 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Jabatan Struktural : 25 orang
 - Jabatan Fungsional : 126 orang
 - Jabatan Fungsional Umum : 45 orang
 - Tenaga Harian Lepas Penyuluh Bantu (non PNS) : 106 orang
- c. Komposisi SDM PNS Dinas Pertanian dan Pangan sesuai jenjang pendidikan sejumlah 196 orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Pasca sarjana (S.2) : 13 orang
 - Sarjana (S.1 / D.4) : 107 orang
 - Diploma 3 / Aksdemi : 25 orang
 - SLTA : 46 orang
 - SLTP : 4 orang
 - SD : 1 orang
- d. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Pangan :
 - Kendaraan Dinas
 - Kendaraan roda 4 : 6 unit
 - Kendaraan roda 2 : 126 unit
 - Inventaris Kantor
 - Komputer : 39 unit
 - Laptop : 73 unit
 - LCD proyektor : 17 unit
 - Mesin ketik : 15 unit
 - Printer : 85 unit
 - Telepon : 2 unit

- Faximile : 1 unit
- AC : 16 unit
- Pengeras suara (*wireless*) : 19 unit
- Perlengkapan Kantor
 - Meja kerja : 151 unit
 - Kursi : 307 unit
 - Meja dan kursi tamu : 5 set
 - Meja rapat : 43 unit
 - Kursi rapat : 704 unit
- Gedung : 24 unit
- Asrama dan Ruang Belajar : 1 unit
- Gudang Pangan : 1 unit
- Kebun Dinas
 - Kaponan (Pakis) : 4.410 m²
 - Diwak (Tegalrejo) : 31.680 m²
 - Banjarnegara (Mertoyudan) : 1.880 m²
 - Lahan percontohan (Srowol) : 10.000 m²

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2014 – 2018 tercantum dalam Tabel 2.5. berikut ini : (ada)

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ketersediaan energi perkapita (Kkal)				1911,8	1960,8	1980	1980	1980	1.936,4	2.876	2.683	2.832,92	3.070	101,29	146,67	135,45	155,05	155,05
2	Ketersediaan protein perkapita (gr)				50,3	50,3	51,3	51,3	51,3	56	73,7	76,61	72,17	77,93	111,33	146,52	149,34	140,68	151,91
3	Penguatan cadangan pangan (%)				56,00	60,00	61,00%	62,00%	63,00%	60,00%	67,00%	75,10%	76,21%	76,70%	107,14	111,67	123,11	122,92	121,75
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah				66,67%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	55,29%	50,14%	91,67%	92,58%	93,10%	82,93	55,71	101,86	102,87	103,44
5	Stabilitas harga dan pasokan pangan				82,30%	90%	90,80%	91,54%	93,10%	76,60%	99,00%	93,33%	93,45%	93,95%	93,07	110	102,79	102,63	100,91
6	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)				84%	85,50%	86%	87%	87%	92,30%	85,70%	87,33%	87,10%	87,90%	109,88	100,23	101,55	100,69	101,03
7	Pengawasan dan pembinaan kewanamanan pangan				40,00%	50,00%	60,00%	85,70%	87,50%	40%	50%	91,66%	92,47%	92,78%	100	100	152,77	107,90	106,03
8	Penanganan daerah rawan pangan				57,14%	60,00%	62,90%	64,29%	65,70%	81,13%	87,50%	69,64%	70,04%	70,20%	141,98	145,83	110,72	108,94	106,85
9	Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku utama (kelas utama)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
10	Tingkat pertumbuhan lembaga ekonomi petani				1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	100	100	100	100,00	100,00
11	Cakupan pembinaan kelembagaan tani				6,50%	7,60%	8,40%	8,40%	8,40%	6,50%	7,60%	8,40%	8,40%	8,40%	100	100	100	100,00	100,00
12	Peningkatan kerjasama/ kemitraan yang terjalin (kemitraan)				4	4	6	6	6	4	4	4	6	6	100	100	100	100,00	100,00
13	Produksi bibit yang dihasilkan dari laboratorium (btg)				8.920	9.738	9.968	10.068	10.918	8.920	9.738	9.968	10.068	10.918	100	100	100	100,00	100,00
14	Pengelolaan hasil pertanian yang bermutu, berdaya saing dan aman dikonsumsi (kelompok)				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100,00	100,00
15	Cakupan ketersediaan alsintan				1,30%	1,30%	1,40%	1,40%	1,40%	1,29%	1,02%	1,02%	1,40%	1,40%	99,23	78	73	100,00	100,00
16	Peningkatan kerja sama dg lembaga penelitian (kerjasama)				3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	100	100	100	100,00	100,00

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
17	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar																		
	Produktivitas padi (kw/ha)				60	60,03	60,05	60,08	60,09	60,07	62,11	63,42	62,24	63,72	103,52	105,65	103,65	106,06	172,27
	Produksi padi (ton)				355.180	355.250	355.352	355.534	355.617	345.893	366.981	422.153	478.266	478.199	97,39	103,30	118,80	134,52	134,47
18	Luas lahan pertanian yang tersertifikasi organik (Ha)				137,5	144	181	149	149	137,5	144	269	149	149	100	100	148,61	100,00	100,00
18	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan				4,80%	3,10%	3,40%	3,40%	3,80%	3,29%	1,42%	0,18%	2,45%	3,80%	68,54	45,81	5,29	72,06	100,00
20	Peningkatan kepuasan petani atas pelayanan penyuluhan				80,00%	82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	80,00%	82,00%	84,00%	86,00%	88,00%	100	100	100	100,00	100,00

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan pangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan umum, serta pembinaan dalam urusan pertanian, dan ketahanan pangan beberapa indikator kinerja dijadikan sebagai indikator keberhasilan pelayanan SKPD. Selama kurun waktu 2014 – 2019, sebanyak 20 indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Rasio antara capaian indikator kinerja yang melampaui target kinerja kerjanya tahun 2014- 2019 yaitu pada indikator :
 - e. ketersediaan energi per kapita
 - f. Ketersediaan protein perkapita
 - g. Penguatan cadangan pangan
 - h. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
 - i. Stabilitas harga dan pasokan pangan
 - j. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
 - k. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
 - l. Penanganan daerah rawan pangan
 - m. Peningkatan produksi/ produktivitas komoditas pertanian/ perkebunan
 - n. Luas lahan pertanian yang tersertifikasi organik

2. Rasio antara capaian indikator kinerja sesuai dengan target kinerja kerjanya tahun 2014- 2016 yaitu pada indikator :
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku utama
 - b. Tingkat pertumbuhan lembaga ekonomi petani
 - c. Cakupan pembinaan kelembagaan tani
 - d. Peningkatan kerjasama/ kemitraan yang terjalin
 - e. Cakupan ketersediaan alsintan
 - f. Produksi bibit yang dihasilkan dari laboratorium
 - g. Pengelolaan hasil pertanian yang bermutu, berdaya saing dan aman dikonsumsi
 - h. Peningkatan kerjasama dengan lembaga penelitian
 - i. Luas lahan pertanian yang tersertifikasi organik
 - j. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan
 - k. Peningkatan kepuasan petani atas pelayanan penyuluhan.

Anggaran belanja sejak tahun 2014-2019 mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi karena di tahun 2015 Distan dan Pangan mendapat alokasi DAK tambahan. Kebutuhan belanja Dinas Pertanian dan Pangan untuk mengakomodir berbagai permasalahan yang terjadi di bidang pertanian dan pangan. Namun realisasi belanja setiap tahunnya mengalami kendala sehingga penyerapan anggaran tidak optimal. Permasalahan tersebut diantaranya adalah :

- a. Sebagian besar kegiatan Distan dan Pangan adalah berupa hibah ke kelompok tani. Adanya perubahan regulasi yaitu tentang prosedur hibah dan bansos sesuai UU 23 tahun 2014 yang mensyaratkan

- kelompok penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia, menyebabkan rendahnya serapan anggaran di tahun 2015 dan 2016.
- b. Pelaksanaan belanja barang jasa dan modal yang mundur dikarenakan masalah teknis pengadaan, sehingga menumpuk di akhir tahun (bulan Desember).
 - c. Beberapa kegiatan yang bersifat teknis pelaksanaan mundur dari waktu yang direncanakan karena pengaruh musim.

Jumlah anggaran dan realisasi pendapatan daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang selama kurun waktu tahun 2014-2016 sebagaimana terinci pada Tabel 2.6. berikut ini.

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan Asli Daerah	26.000.000	31.000.000	34.500.000	175.500.000	25.000.000	22.850.000	49.830.000	42.960.000	198.050.000	38.425.000	87,88	160,74	124,52	112,85	153,70	(250.000)	3.893.750
Belanja Tidak Langsung	17.488.808.000	19.357.978.000	19.576.057.037	14.939.177.000	15.804.122.000	16.222.995.101	17.823.385.214	18.056.998.116	13.457.057.319	15.015.838.430	92,76	92,07	92,24	90,08	95,01	(421.171.500)	(301.789.168)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	828.182.000	777.453.200	854.900.000	539.390.000	484.516.000	800.814.691	757.825.437	786.329.506	517.300.417	435.560.390	96,70	97,48	91,98	95,90	89,90	(85.916.500)	(91.313.575)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.374.926.800	2.771.148.800	2.953.732.100	1.564.476.000	1.360.496.000	2.096.905.468	2.452.113.720	2.489.697.284	1.203.500.319	857.632.705	88,29	88,49	84,29	76,93	63,04	(253.607.700)	(309.818.191)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	13.000.000	16.780.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	12.999.500	16.780.000	14.999.300	19.429.085	19.905.400	100,00	100,00	100,00	97,15	99,53	1.750.000	1.726.475
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	19.948.000	30.000.000	46.000.000	20.064.000	151.177.000	19.919.555	28.978.930	40.037.545	18.557.995	14.402.920	99,86	96,60	87,04	92,49	9,53	32.807.250	(1.379.159)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	32.000.000	47.000.000	32.000.000	8.350.000	9.000.000	28.359.190	46.550.580	31.326.935	8.280.030	8.983.360	88,62	99,04	97,90	99,16	99,82	(5.750.000)	(4.843.958)
Program Pengembangan Data/ Informasi	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	(3.750.000)	(3.750.000)
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000	-	-	-	-	14.959.000	-	-	-	-	99,73	-	-	-	-	(3.750.000)	(3.739.750)
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	-	45.000.000	45.000.000	45.000.000	55.400.000	-	29.904.870	34.944.650	42.696.840	54.464.950	-	66,46	77,65	94,88	98,31	13.850.000	13.616.238

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	309.907.000	614.050.000	336.823.500	281.716.900	-	309.042.995	595.361.775	335.532.165	280.565.050	-	99,72	96,96	99,62	99,59	70.429.225	70.141.263
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	-	-	34.595.000	25.774.000	20.620.000	-	-	34.552.450	23.716.135	20.087.400	-	-	99,88	92,02	97,42	5.155.000	5.021.850
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	-	-	40.000.000	27.207.800	49.960.500	-	-	39.600.400	27.097.450	49.299.700	-	-	99,00	99,59	98,68	12.490.125	12.324.925
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.293.000.000	1.699.046.000	1.197.772.500	918.332.400	608.572.100	1.089.518.175	1.374.775.179	1.152.964.595	780.066.510	568.296.680	84,26	80,91	96,26	84,94	93,38	(171.106.975)	(130.305.374)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	65.000.000	186.133.000	390.000.000	542.299.000	365.291.975	64.595.120	181.615.510	380.374.328	534.099.025	363.453.440	99,38	97,57	97,53	98,49	99,50	75.072.994	74.714.580
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan	-	70.000.000	25.000.000	-	-	-	69.529.900	24.950.000	-	-	-	99,33	99,80	-	-	-	-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	-	70.000.000	25.000.000	-	-	-	69.927.725	24.950.000	-	-	-	99,90	99,80	-	-	-	-
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan	1.380.000.000	860.000.000	355.000.000	1.211.597.000	266.615.650	1.286.900.710	316.001.180	337.183.695	1.162.104.565	262.809.470	93,25	36,74	94,98	95,92	98,57	(278.346.088)	(256.022.810)
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	13.664.252.000	29.729.331.000	19.014.612.048	21.012.321.098	17.235.386.000	12.874.242.540	5.628.125.956	1.291.181.185	12.862.150.190	14.831.553.662	94,22	18,93	6,79	61,21	86,05	892.783.500	489.327.781

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Produksi Peternakan	-	81.338.000	-	-	-	-	70.576.050	-	-	-	-	86,77	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian	49.634.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.408.500)	-
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	489.907.575	516.930.000	736.278.800	1.152.767.500	917.422.075	466.490.000	496.190.753	625.789.800	1.045.311.160	889.540.835	95,22	95,99	84,99	90,68	96,96	106.878.625	105.762.709
Program Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	294.515.000	-	-	-	-	291.355.775	-	-	-	-	98,93	-	-	-	-	(73.628.750)	(72.838.944)
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	220.000.000	-	-	-	-	214.014.000	-	-	-	-	97,28	-	-	-	-	(55.000.000)	(53.503.500)
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	250.575.000	491.824.000	835.290.000	975.611.200	737.143.900	250.546.475	488.331.530	818.184.405	970.187.405	732.490.680	100	99,29	97,95	99,44	99,37	121.642.225	120.486.051
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	410.000.000	180.000.000	-	-	-	403.237.750	29.530.330	-	-	-	98,35	16,41	-	-	-	(102.500.000)	(100.809.438)
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	3.263.633.865	1.352.831.722	701.332.500	-	-	1.613.409.665	470.572.210	234.690.905	-	-	49,44	34,78	33,46	-	-	(815.908.466)	(403.352.416)
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	50.000.000	99.992.000	80.000.000	-	-	48.886.050	54.638.840	78.179.800	-	-	97,77	54,64	97,72	-	-	(12.500.000)	(12.221.513)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	295.262.000	97.065.000	20.000.000	-	-	279.836.720	91.137.575	19.814.720	-	-	94,78	93,89	99,07	-	-	(73.815.500)	(69.959.180)
Jumlah Belanja Langsung	25.023.836.240	39.431.779.722	28.015.562.948	28.400.013.498	22.563.318.100	21.871.990.384	12.982.149.270	9.055.113.278	19.550.029.291	19.389.046.642	87,40	32,92	32,32	68,84	85,93	(615.129.535)	(620.735.936)
Jumlah Belanja Total	42.512.644.240	58.789.757.722	47.591.619.985	43.339.190.498	38.367.440.100	38.094.985.485	30.805.534.484	27.112.111.394	33.007.086.610	34.404.885.072	89,61	52,40	56,97	76,16	89,67	(1.036.301.035)	(922.525.103)

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan 2019-2024 terhadap Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 terdapat keterkaitan antara capaian sasaran indikator kinerja dengan berbagai tantangan dan peluang.

Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Laju alih fungsi lahan yang semakin besar.
2. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani.
3. Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian yang belum optimal.
4. Masuknya komoditi pertanian impor yang menyaingi produk petani.
5. Makin berkurangnya minat generasi muda yang mau bekerja pada bidang pertanian.
6. Semakin tingginya persaingan produk pertanian mengharuskan adanya peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian melalui penerapan teknologi yang berkembang, dan produksi pertanian aman yang dikonsumsi.
7. Perubahan iklim yang memicu bencana dan adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Adapun peluang yang dapat mendukung pengembangan pelayanan SKPD Distan dan Pangan adalah sebagai berikut :

1. SDM pertanian baik petani maupun Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Sebagian besar penduduk Kabupaten Magelang bekerja sebagai petani adalah peluang pengembangan pertanian, melalui pembinaan yang intensif, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani melalui kursus, bimbingan teknis, magang dan sekolah lapang.
2. Meningkatnya kebutuhan akan hasil produksi pangan karena pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat merupakan peluang bagi pemenuhan akan kebutuhan pangan masyarakat.
3. Agroklimat Kabupaten Magelang yang sesuai untuk budi daya pertanian merupakan peluang yang harus didukung dengan ketersediaan fungsi sarana dan prasarana pertanian perkebunan guna meningkatkan fungsi lahan pertanian.
4. Pengembangan komoditas pertanian unggul dan promosi produk pertanian.
5. Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan ramah lingkungan.
6. Opimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan sapa usaha tani dan mendorong dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian berkelanjutan.

Hasil Telaahan terhadap RTRW :

Telaahan struktur ruang wilayah meliputi rencana pengembangan sistem pusat pelayanan perkotaan dengan mengembangkan infrastruktur berupa pembangunan jalan dan pelayanan terminal agribisnis yang terintegrasi dengan pusat kawasan agropolitan maupun pusat kawasan budi daya pertanian/perkebunan. Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Kaliangkrik sebagai pusat penghasil produk sayuran, Kecamatan Pakis dan Ngablak sebagai penghasil tanaman

sayuran dan bunga, Kecamatan Dukun sebagai pusat perdagangan hasil pertanian kawasan agropolitan Merapi-Merbabu (STA Sewukan), Kecamatan Grabag sebagai sentra produksi kopi dan Kecamatan Salam sebagai pusat pemasaran hasil pertanian skala regional antar kabupaten dan nasional antar provinsi. Pengembangan infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Magelang.

Sistem prasarana lainnya berupa sistem jaringan sumber daya air dengan melakukan konservasi lahan di daerah tangkapan air baik secara vegetasi maupun sipil teknis antara lain sumur resapan, embung, gully plug serta partisipasi masyarakat dalam konservasi lahan. Pengembangan jaringan irigasi dengan peningkatan jaringan irigasi teknis, setengah teknis dan sederhana untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengoptimalkan jaringan irigasi sederhana untuk memenuhi kebutuhan air di lahan sawah yang tidak dilayani dengan irigasi teknis.

Pola ruang Kabupaten Magelang secara umum terdiri dari kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis. Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, kawasan yang menjadi sasaran pelaksanaan program dan kegiatan adalah kawasan budi daya yang meliputi kawasan budi daya pertanian, kawasan budi daya hutan rakyat, dan kawasan budi daya perkebunan. Pembangunan Kabupaten Magelang tengah dilakukan langkah-langkah penataan dengan memperhatikan sebaran pengembangan dan hierarki fungsi yang terkait dengan tata guna lahan.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program sebagai upaya memantapkan produktivitas pertanian khususnya padi di wilayah Kabupaten Magelang sebagai pilar penyangga pangan diperlukan kepastian lahan sawah yang disebut dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam menentukan kebijakan pengembangan wilayah agar memperhatikan potensi lahan yang harus dipertahankan dan yang boleh dialihfungsikan untuk pengembangan wilayah.

Kawasan perkebunan adalah kawasan pertanian yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi. Adapun yang termasuk dalam kawasan ini adalah seluruh kawasan yang sesuai untuk budi daya tanaman tahunan, termasuk kawasan yang telah dikembangkan tanaman keras baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan perkebunan.

Pertimbangan penetapan alokasi ruang untuk kegiatan perkebunan adalah:

1. Kesesuaian lahan untuk jenis tanaman perkebunan dan tanaman tahunan;
2. Kondisi perkebunan yang telah berkembang.

Wilayah yang termasuk kawasan perkebunan tersebar di Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Bandongan, Tempuran, Salaman, Borobudur, Srumbung, Dukun, Sawangan, Candimulyo, Tegalrejo, Pakis, Ngablak. Pemanfaatan kawasan perkebunan di Kabupaten Magelang diatur dengan :

1. Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.
2. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing.

Hasil Telaahan terhadap KLHS :

Hasil telaah terhadap kajian lingkungan hidup strategis adalah munculnya pengaruh lingkungan sebagai berikut :

1. Pengelolaan lahan yang berlebihan karena penggunaan sarana produksi yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan daya dukung lahan pertanian semakin menurun, untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pembinaan yang intensif kepada petani untuk menggunakan sarana produksi yang ramah lingkungan.
2. Penggunaan pupuk kimia, pestisida dan alat mesin pertanian dapat meningkatkan pencemaran lahan pertanian. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan sosialisasi tentang penggunaan pupuk dan pestisida kimia sesuai anjuran melalui SLPHT dan SLPTT, memperbanyak penggunaan pupuk organik agensia hayati dan pestisida hayati, melakukan standarisasi pertanian dan pengelolaan pertanian organik secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh lembaga yang berkompeten.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Perumusan kebijakan dan strategi dalam membangun pertanian dan pangan di Kabupaten Magelang beberapa tahun ke depan memerlukan analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan dan berpengaruh dalam proses mencapai tujuan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Tujuan umum pembangunan pertanian dan pangan adalah meningkatkan produksi pertanian untuk mendukung kedaulatan pangan. Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan komoditas pertanian yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Magelang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta kebijakan. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor demografi, lingkungan hidup, iklim, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia yang menjadi objek kebijakan (petani), pangsa pasar serta investor. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang ada yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian yang dapat menyebabkan produksi dan produktivitas pertanian tidak tercapai sesuai yang diharapkan serta belum optimalnya pola kemitraan untuk memperluas jangkauan pemasaran hasil pertanian. Di samping itu minat generasi muda untuk ikut berperan aktif di sektor pertanian semakin berkurang pada saat ini. Identifikasi permasalahan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang diuraikan dalam Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan yang beragam kurang optimal	Produksi pangan yang fluktuatif
		Penanganan daerah rawan pangan belum optimal	
		Belum optimalnya cadangan pangan dan distribusi pangan di masyarakat	Masih rendahnya cadangan pangan daerah
		Belum optimalnya informasi, pasokan, harga dan akses pangan.	
		Belum terpenuhinya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, beragam, bergizi, seimbang dan aman	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan belum optimal	
2.	Masih rendahnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya produksi pertanian	Kepemilikan lahan pertanian relatif sempit dan menyebar
		Masih rendahnya daya saing produk pertanian	Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian
		Masih rendahnya kerjasama/kemitraan di bidang pertanian	
		Belum optimalnya dukungan infrastruktur, permodalan, prasarana dan sarana pertanian	
		Belum optimalnya peranan dan pemberdayaan penyuluhan dalam pengembangan SDM pertanian	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”**. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang **Sejahtera** dan berahlak mulia.
- 2) Meningkatkan **Daya Saing** Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang **Amanah**.

Dari visi dan misi tersebut dijabarkan dalam Dasa Cita Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- 1) Kehidupan beragama dan berahlak mulia
- 2) Pendidikan
- 3) Kesehatan
- 4) Penanggulangan Kemiskinan
- 5) Pengembangan Pertanian, Pariwisata dan UKM
- 6) Sarana dan prasarana publik
- 7) Lingkungan hidup
- 8) Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- 9) Ketentraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana
- 10) Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-1 yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang **Sejahtera** dan berahlak mulia, serta misi ke-2 yaitu Meningkatkan **Daya Saing** Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. Sedangkan Program Prioritas Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan cita yang ke-4 yaitu Penanggulangan Kemiskinan dan cita ke-5 yaitu Pengembangan Pertanian, Pariwisata dan UKM.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Kabupaten Magelang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”					
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan berahlak mulia	<p>Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan, dan kesekretariatan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan; 			

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>3. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi kesekretariat-an Dinas Pertanian dan Pangan;</p> <p>6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p> <p>7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p>	<p>Produksi bahan pangan non beras terbatas antara lain karena terbatasnya luas lahan produksi, teknologi budidaya dan pengolahannya</p>	<p>Komitmen seluruh jajaran SKPD dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan, untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah</p>	<p>Diversifikasi pangan masyarakat belum berjalan secara optimal</p>

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Misi 2 : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya			
	Program Pengembangan Pertanian, Pariwisata dan UKM		Kebutuhan pangan yang semakin meningkat	Letak Kabupaten Magelang yang strategis, serta agroklimat yang mendukung sebagai sentra pertanian	Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
			Pendapatan petani masih rendah	Pembinaan kelompok tani yang intensif untuk meningkatkan pendapatan petani	Masih sulitnya mengubah perilaku/ kebiasaan petani dalam melakukan usaha taninya
			Masih rendahnya kerjasama/ kemitraan di bidang pertanian antara lembaga petani dengan pihak swasta atau pemerintah	Permintaan konsumen terhadap produk pertanian yang berkualitas semakin meningkat	Kelompok tani masih enggan melakukan kemitraan karena keterbatasan modal

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian.	Adanya dukungan dana, sarana dan prasarana dari Pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Pemerintah Pusat	Keterbatasan sarana dan prasarana serta kualitas SDM yang profesional, memiliki pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam penguasaan dan penerapan teknologi
			Belum optimalnya SDM pertanian yang berkualitas, terampil, profesional dan mandiri	Pembinaan, sosialisasi dan pelatihan serta bantuan sarana dan prasarana yang mendukung penyuluhan pertanian	Jumlah penyuluh yang semakin berkurang karena purna tugas sehingga jangkauan penyuluhan pun makin berkurang..

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi /Kabupaten/Kota Lain

A. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019

Visi dari kementerian Pertanian yaitu :

Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

Untuk menggapai visi tersebut Kementerian Pertanian memiliki 4 Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan reformasi birokrasi.

B. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian 2015-2019

Visi dari Badan Ketahanan Pangan yaitu :

Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi dan tujuan masing-masing misi, ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan.
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok.
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

C. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

Tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan selama periode tahun 2018-2023 adalah memantapkan produksi komoditas pertanian dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di Jawa Tengah

Sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang akan dicapai selama periode tahun 2018-2018 adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
- b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.

D. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah :
adalah meningkatkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah,
dengan indikator tujuan Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
adalah meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan
yang berkualitas, yang ditunjukkan dengan indikator PPH
Ketersediaan (skor), Angka Konsumsi Energi (kcal/kapita/hari)
dan Angka Konsumsi Protein (gram/kapita/hari).

Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat
Daerah Provinsi pada Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

No.	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	<p>Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan, dan kesekretariatan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan; 	Kebutuhan pangan yang semakin meningkat	Letak Kabupaten Magelang yang strategis, serta agroklimat yang mendukung sebagai sentra pertanian	Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

No.	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
2.	Peningkatan diversifikasi pangan		<p>3. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi sekretariat Dinas Pertanian dan Pangan;</p> <p>6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p>			

No.	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6	7
3.	Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor	a. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. b. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan.	7. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan; 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	Masih rendahnya kerjasama/ kemitraan di bidang pertanian antara lembaga petani dengan pihak swasta atau pemerintah	Permintaan konsumen terhadap produk pertanian yang berkualitas semakin meningkat	Kelompok tani masih enggan melakukan kemitraan karena keterbatasan modal
4.	Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi			Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian.	Adanya dukungan dana, sarana dan prasarana dari Pemerintah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Pemerintah Pusat	Sarana dan prasarana yang terbatas serta kualitas SDM yang profesional, memiliki pengetahuan dan keterampilan khususnya dalam penguasaan dan penerapan teknologi
5.	Peningkatan pendapatan keluarga petani			Pendapatan petani masih rendah	Pembinaan kelompok tani yang intensif untuk meningkatkan pendapatan petani	Masih sulitnya mengubah perilaku/ kebiasaan petani dalam melakukan usaha taninya
6.	Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik	Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan		Belum optimalnya SDM pertanian yang berkualitas, terampil, profesional dan mandiri	Pembinaan, sosialisasi dan pelatihan serta bantuan sarana dan prasarana yang mendukung penyuluhan pertanian.	Jumlah penyuluh yang semakin berkurang karena purna tugas sehingga jangkauan penyuluhan pun makin berkurang.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kawasan budidaya merupakan ranah utama dalam pengembangan sektor pertanian dan pangan. Pengembangan infrastruktur berupa jalan dan irigasi diharapkan dapat menjadi pendukung pengembangan sektor pertanian dan pangan di seluruh wilayah di Kabupaten Magelang berdasarkan kondisi topografis dan geografisnya. Tingginya tingkat alih fungsi lahan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis, permasalahan utama yang menjadi kendala dalam pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang adalah adanya pencemaran lingkungan karena penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian. Hal ini mengakibatkan lahan mengalami kerusakan sementara di sisi lain terdapat peningkatan permintaan konsumen atas produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal dikonsumsi. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembinaan kepada para petani tentang penggunaan sarana produksi pertanian yang ramah lingkungan dan dilaksanakan standarisasi terhadap produk organik. Telaah RTRW dan KLHS secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1.	RTRW				
A	Pola Ruang RTRW				
1.	Rencana kawasan budidaya pertanian dan perkebunan	<p>Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.</p> <p>Fungsi :</p> <p>a. Perumusan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, ketahanan pangan, dan kesekretariatan;</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p>	Adanya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang.	Kebutuhan komoditas pertanian dan perkebunan yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk	Adanya ketidaksesuaian implementasi pembangunan daerah terhadap Perda RTRW

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
B	Struktur Ruang RTRW	<p>c. Pelaksanaan kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pertanian dan Pangan;</p> <p>f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p> <p>g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, prasarana dan sarana, penyuluhan dan sumber daya manusia pertanian, dan ketahanan pangan;</p>		Komitmen seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Adanya ketidaksesuaian implementasi pembangunan daerah terhadap Perda RTRW

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1.	Sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah	h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	Belum optimalnya sistem jaringan jalan yang terintegrasi dengan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah	Komitmen seluruh jajaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan teknis bidang pertanian dan pangan untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Adanya ketidaksesuaian implementasi pembangunan daerah terhadap Perda RTRW
2.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air		Belum optimalnya penyediaan dan pengembangan irigasi pertanian		
II	KLHS				
A	Permasalahan dan Isu Strategis				
1.	Penduduk dengan asupan kalori di bawah standar minimum		Meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal dikonsumsi	Standarisasi pertanian dan pengelolaan pertanian organik secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh lembaga yang berkompeten.	Masih sulitnya mengubah perilaku/kebiasaan petani untuk mengelola lahan pertanian menuju pertanian organik
2.	Nilai tambah pertanian				

No.	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
B	Skenario dan Rekomendasi				
1	Penetapan LP2B dan didukung dengan rehabilitasi dan pembangunan sistem jaringan irigasi terutama untuk meningkatkan lahan tadah hujan menjadi lahan basah dengan sistem irigasi yang dapat mendukung produktivitas tahunan pertanian tanaman pangan		Penurunan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan		

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang yang meliputi analisis Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisis KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan.

Isu ketersediaan pangan yang bergantung pada produksi, perlu mendapatkan perhatian mengingat lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi pangan, luasnya semakin terbatas. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada.

2. Cadangan Pangan

Isu cadangan pangan sangat penting untuk ditangani. Adanya tantangan iklim ekstrim memicu terjadinya bencana dan pergeseran masa tanam yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan penguatan cadangan pangan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat agar pangan dapat tersedia sepanjang waktu.

3. Informasi Harga, Rantai Pasok, Jaringan Distribusi dan Sistem Logistik Daerah.

Isu ini diperlukan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan. Kebijakan tersebut antara lain terkait intervensi yang perlu dilakukan ketika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga dan gangguan akses pangan. Stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

4. Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Magelang masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan di masyarakat maupun pemerintah.

5. Konsumsi pangan masyarakat
Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, seimbang dan aman yang masih terbatas.
6. Keamanan pangan segar
Saat ini masih cukup banyak digunakan kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen terhadap keamanan pangan segar.
7. Belum optimalnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
8. Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air serta dampak perubahan iklim.
9. Belum optimalnya manajemen dan kelembagaan usaha tani.
10. Belum optimalnya infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian.
11. Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian.
12. Masih lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar dan kerjasama/kemitraan di bidang pertanian antara lembaga petani dengan pihak swasta atau pemerintah.
13. Peranan SDM pertanian dan pemberdayaan penyuluhan dalam pengembangan pertanian belum optimal.
14. Masih rendahnya perlindungan terhadap petani.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Magelang

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan pertanian dan pangan selama periode tahun 2019-2024, melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan.

Tujuan

Tujuan pembangunan pertanian dan pangan selama periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketahanan pangan daerah
- b. Meningkatkan produksi/ produktivitas komoditas pertanian/ perkebunan
- c. Meningkatkan mutu dan daya saing komoditas pertanian/ perkebunan.
- d. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
- e. Meningkatkan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Sasaran :

Tujuan pembangunan pertanian dan pangan selama periode tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan di masyarakat.
- b. Meningkatnya produksi/ produktivitas komoditas pertanian/ perkebunan.
- c. Meningkatnya mutu dan daya saing komoditas pertanian/ perkebunan.
- d. Tercukupinya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan.
- e. Menngkatnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnyaketahanan pangan daerah	Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	76,32	77,37	78,42	79,47	80,52	81,57	82,62	82,62	
			Ketersediaan pangan utama beras (kg/jiwa/th)	212,65	211,91	211,22	210,66	210,10	209,55	208,99	208,99	
			Stabilitas harga pangan (%)	93,95	93,96	96,97	98,98	94,00	94,15	94,3	94,3	
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (%)	87,90	87,95	87,98	88,00	88,10	88,25	88,40	88,40	
2	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (milyar rupiah)	6.622,23	6.997,70	7.373,16	7.748,63	8.124,10	8.499,56	8.875,03	8.875,03	
			Produksi Padi (ton)	478.199	478.300	478.500	479.000	479.500	480.000	480.500	480.500	
			produksi jagung (ton) pipilan kering	51.446	51.448	51.450	51.500	51.550	51.600	51.650	51.650	
			Produksi cabe (ton) segar	21.112,40	21.534,60	39.457	40.071	40.399	40.783	41.183	41.183	
			Produksi bawang putih (ton) askip	2.053,50	2.156,20	2.264,0	2.377,2	2.424,7	2.473,2	2.522,70	2.522,70	
			Produksi kopi (ton) ose kering	1.468	1.480	1.490	1.500	1.510	1.520	1.530	1.530	
			Produksi cengkeh (ton) bunga kering	161	163	165	167	169	171	173	173	
			Produksi kelapa dalam (ton) kopra	7.520	7.525	7.530	7.535	7.540	7.545	7.550	7.550	
			Produksi salak (ton) segar	69.362	69.372	69.380	69.390	69.400	69.410	69.420	69.420	
			Produksi jeruk (kuintal) segar	2.646	2.650	2.655	2.660	2.665	2.670	2.675	2.675	
			Produksi kelengkeng (ton) segar	88	90	93	95	97	99	100	100	
			Persentase produk pertanian yang terstandarisasi (%)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,5

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian dan pangan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang guna mewujudkan Kabupaten Magelang yang SEDAYA AMANAH.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pertanian dan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Strategi dan arah kebijakan yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pertanian dan pangan secara terinci pada tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)			
MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan berahlak mulia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan	Tercukupinya ketersediaan pangan secara merata	Terpenuhinya kebutuhan kalori dan protein masyarakat secara merata
			Tersedianya sistem pengawasan pangan dan gizi
		Tersedianya cadangan pangan dan distribusi pangan yang merata	Tersedianya cadangan pangan yang mencukupi
			Tersedianya informasi dan akses pangan
		Penganekaragaman konsumsi pangan, mutu pangan dan keamanan pangan	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, mutu pangan dan keamanan pangan berbasis kearifan lokal
			Peningkatan pengawasan, pembinaan mutu dan keamanan pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 2 : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup			
Meningkatnya daya saing daerah	Pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian	Peningkatan nilai tambah produk pertanian
		Meningkatkan jalinan kerja sama/kemitraan antara lembaga petani dengan pihak-pihak terkait	Peningkatan jejaring agribisnis
		Meningkatkan ketersediaan dan fungsi prasarana dan sarana pertanian	Penyiapan dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian
		Meningkatkan peran penyuluhan dalam pemberdayaan sumber daya manusia pertanian	Meningkatkan peran dan kapasitas penyuluh dalam pendampingan petani

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan pada satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan pangan dan urusan pilihan pertanian.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

- 1) Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan
- 3) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah
- 4) Pengembangan dan Penguatan Distribusi Pangan
- 5) Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- 6) Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan
- 7) Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)

B. Urusan Pilihan Pertanian :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka
- 2) Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
- 3) Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
- 4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
- 5) Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya

- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya
- 7) Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara

2. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 3) Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Penyusunan Dokumen Norma Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- 1) Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian
- 2) Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura
- 3) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- 4) Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
- 5) Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan
- 6) Pengembangan Benih Tanaman Unggulan
- 7) Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek
- 8) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)
- 9) Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT)
- 10) Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT)

4. Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian

- 1) Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan
- 2) Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura
- 3) Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
- 4) Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (DBHCHT)
- 5) Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar
- 6) Peningkatan Daya Saing Tanaman Tahunan dan Rempah
- 7) Gelar Promosi Produk Pertanian Unggulan
- 8) Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian

- 1) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
- 2) Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian
- 3) Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian (DAK)
- 4) Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian
- 5) Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
- 6) Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk

- 7) Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)
- 8) Pembiayaan Pertanian

6. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian

- 1) Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani
- 2) Penyusunan Programa Penyuluhan Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian
- 4) Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian
- 6) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)

Secara rinci rencana program dan kegiatan tahun 2019-2024 pada tabel 6.1 berikut ini :

**Tabel 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.			
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan			Indeks Ketahanan Pangan	76,32 angka (0-100)	77,37 angka (0-100)	78,42 angka (0-100)	1,334,271,850	79,47 angka (0-100)	1,314,271,850	80,52 angka (0-100)	1,319,271,850	81,57 angka (0-100)	1,334,271,850	82,62 angka (0-100)	1,324,271,850	82,62 angka (0-100)	6,626,359,250			
				Ketersediaan pangan utama beras	212,65 kg/jiwa/th	211,91 kg/jiwa/th	211,22 kg/jiwa/th	1,334,271,850	210,66 kg/jiwa/th	1,314,271,850	210,10 kg/jiwa/th	1,319,271,850	209,55 kg/jiwa/th	1,334,271,850	208,99 kg/jiwa/th	1,324,271,850	208,99 kg/jiwa/th	6,626,359,250			
				Stabilitas harga pangan	93,95 persen	93,96 persen	93,97 persen		93,98 persen		94 persen		94,15 persen		94,3 persen		94,3 persen				
				Skor Pola Pangan Harapan	87,9 persen	87,95 persen	87,98 persen		88 persen		88,1 persen		88,25 persen		88,4 persen		88,4 persen				
	2.3.2.3.1.1.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Ketersediaan energi per kapita	3070 Kkal	2000 Kkal	2000 Kkal	1,334,271,850	2000 Kkal	1,314,271,850	2000 Kkal	1,319,271,850	2000 Kkal	1,334,271,850	2000 Kkal	1,324,271,850	2000 Kkal	6,626,359,250				
	2. Ketersediaan protein per kapita		77,93 gram	51,3 gram	53 gram		53 gram		53 gram		53 gram		53 gram		53 gram						
	3. Penguatan cadangan pangan		76.70%	64%	65%		65%		65%		65%		65%		65%						
	4. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)		87,9 indeks	87,5 indeks	87,9 indeks		88,2 indeks		88,4 indeks		88,6 indeks		88,8 indeks		88,8 indeks						
	5. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		92.78%	89%	90%		90%		90%		90%		90%		90%						
	6. Penanganan daerah rawan pangan		65.70%	67.10%	67.50%		67.50%		67.50%		67.50%		67.50%		67.50%						
	7. Ketersediaan informasi pasokan. harga dan akses pangan di daerah		93.10%	90%	91%		91%		91%		91%		91%		91%						
	8. Stabilitas harga dan pasokan pangan		93.95%	93.10%	93.20%		93.20%		93.20%		93.20%		93.20%		93.20%						
	2.3.2.3.1.1.15.50	Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1. Jumlah laporan analisa data Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	85,000,000	1 dokumen laporan	65,000,000	1 dokumen laporan	70,000,000	1 dokumen laporan	85,000,000	1 dokumen laporan	75,000,000	5 dokumen laporan	380,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan		
	2. Jumlah laporan analisa data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan		1 dokumen laporan		1 dokumen laporan		1 dokumen laporan		1 dokumen laporan		1 dokumen laporan	5 dokumen laporan					
	3. Jumlah peta daerah rawan pangan yang disusun		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	2 dokumen					
	2.3.2.3.1.1.15.51	Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan	1. Jumlah pengembangan desa mandiri pangan	10 desa	10 desa	5 desa	250,000,000	5 desa	250,000,000	5 desa	250,000,000	5 desa	250,000,000	5 desa	250,000,000	25 desa	1,250,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				2. Jumlah dokumen kesepakatan Forum Dewan Ketahanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
		2.3.2.3.1.1.15.52	Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah pengelolaan cadangan pangan daerah	25 ton	28 ton	25 ton	200,000,000	25 ton	200,000,000	25 ton	200,000,000	25 ton	200,000,000	25 ton	200,000,000	25 ton	1,000,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		2.3.2.3.1.1.15.53	Pengembangan dan Penguatan Distribusi Pangan	1. Jumlah laporan analisis data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	75,000,000	1 dokumen laporan	75,000,000	1 dokumen laporan	75,000,000	1 dokumen laporan	75,000,000	1 dokumen laporan	75,000,000	5 dokumen laporan	375,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yang produktif	11 lembaga	11 lembaga	15 lembaga		15 lembaga		15 lembaga		15 lembaga		15 lembaga		15 lembaga			
				3. Jumlah hasil pemantuan lembaga distribusi pangan masyarakat yang terdampingi	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
		2.3.2.3.1.1.15.54	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1. Jumlah laporan analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	400,000,000	1 dokumen laporan	400,000,000	1 dokumen laporan	400,000,000	1 dokumen laporan	400,000,000	1 dokumen laporan	400,000,000	5 dokumen laporan	2,000,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah pembinaan pemanfaatan pekarangan	17 kelompok	17 kelompok	10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		50 kelompok			
				3. Jumlah peserta sosialisasi penyusunan menu BZSA	0 orang	0 orang	75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		375 orang			
				4. Jumlah fasilitasi lomba/ festival pangan	3 jenis	3 jenis	3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		3 jenis		18 jenis			
		2.3.2.3.1.1.15.55	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	1. umlah dokumen hasil laporan uji kemandan pangan	0 dokumen laporan	0 dokumen laporan	1 dokumen laporan	150,000,000	1 dokumen laporan	150,000,000	1 dokumen laporan	150,000,000	1 dokumen laporan	150,000,000	1 dokumen laporan	150,000,000	5 dokumen laporan	750,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah peserta pembinaan mutu dan keamanan pangan	0 orang	0 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		250 orang			
		2.3.2.3.1.1.15.56	Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)	Jumlah Kelompok yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan	17 kelompok	17 kelompok	21 kelompok	174,271,850	21 kelompok	174,271,850	21 kelompok	174,271,850	21 kelompok	174,271,850	21 kelompok	174,271,850	105 kelompok	871,359,250	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya daya saing ekonomi				Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	6.622,23* milyar rupiah	6.997,70 milyar rupiah	7.373,16 milyar rupiah	16,757,452,150	7.748,63 milyar rupiah	16,759,452,150	8.124,10 milyar rupiah	16,761,452,150	8.499,56 milyar rupiah	16,763,452,150	8.875,03 milyar rupiah	16,765,452,150	8.875,03 milyar rupiah	83,807,260,750		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.			
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
daerah	Pengembangan produk pertanian berdaya saing dan berwawasan lingkungan			Produksi Padi	478.199 ton (GKP)	478.300 ton (GKP)	478.500 ton (GKP)	16,757,452,150	479.000 ton (GKP)	16,759,452,150	479.500 ton (GKP)	16,761,452,150	480.000 ton (GKP)	16,763,452,150	480.500 ton (GKP)	16,765,452,150	480.500 ton (GKP)	83,807,260,750			
				produksi jagung	51.446 ton (pipilan kering)	51.448 ton (pipilan kering)	51.450 ton (pipilan kering)		51.500 ton (pipilan kering)		51.550 ton (pipilan kering)		51.600 ton (pipilan kering)		51.650 ton (pipilan kering)		51.650 ton (pipilan kering)				
				Produksi cabai	21.112,4 ton (segar)	21.534,6 ton (segar)	39.457 ton (segar)		40.071 ton (segar)		40.399 ton (segar)		40.783 ton (segar)		41.183 ton (segar)		41.183 ton (segar)				
				Produksi bawang putih	2.053,5 ton (askip)	2.156,2 ton (askip)	2.264,0 ton (askip)		2.377,2 ton (askip)		2.424,7 ton (askip)		2.473,2 ton (askip)		2.522,7 ton (askip)		2.522,7 ton (askip)				
				Produksi kopi	1.468 ton (ose kering)	1.480 ton (ose kering)	1.490 ton (ose kering)		1.500 ton (ose kering)		1.510 ton (ose kering)		1.520 ton (ose kering)		1.530 ton (ose kering)		1.530 ton (ose kering)				
				Produksi cengkeh	161 ton (bunga kering)	163 ton (bunga kering)	165 ton (bunga kering)		167 ton (bunga kering)		169 ton (bunga kering)		171 ton (bunga kering)		173 ton (bunga kering)		173 ton (bunga kering)				
				Produksi kelapa dalam	7.520 ton (kopra)	7.525 ton (kopra)	7.530 ton (kopra)		7.535 ton (kopra)		7.540 ton (kopra)		7.545 ton (kopra)		7.550 ton (kopra)		7.550 ton (kopra)				
				Produksi salak	69.362 ton (segar)	69.372 ton (segar)	69.380 ton (segar)		69.390 ton (segar)		69.400 ton (segar)		69.410 ton (segar)		69.420 ton (segar)		69.420 ton (segar)				
				Produksi jeruk	2.646 kuintal (segar)	2.650 kuintal (segar)	2.655 kuintal (segar)		2.660 kuintal (segar)		2.665 kuintal (segar)		2.670 kuintal (segar)		2.675 kuintal (segar)		2.675 kuintal (segar)				
				Produksi kelengkeng	88 ton (segar)	90 ton (segar)	93 ton (segar)		95 ton (segar)		97 ton (segar)		99 ton (segar)		100 ton (segar)		100 ton (segar)				
				Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	0,3 persen	0,3 persen	0,3 persen		0,3 persen		0,3 persen		0,3 persen		0,3 persen		0,3 persen				1,5 persen
		3.3.2.3.1.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100%	1,417,750,000	100%	1,417,750,000	100%	1,417,750,000	100%	1,417,750,000	100%	1,417,750,000	100%	7,088,750,000			
		3.3.2.3.1.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah surat yang dikelola	3500 surat	3500 surat	3700 surat	58,500,000	3700 surat	58,500,000	3700 surat	58,500,000	3700 surat	58,500,000	3700 surat	58,500,000	18500 surat	292,500,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	
		3.3.2.3.1.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	0 kali	0 kali	38 kali	150,000,000	38 kali	150,000,000	38 kali	150,000,000	38 kali	150,000,000	38 kali	150,000,000	190 kali	750,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	
				2. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	0 kali	0 kali	32 kali		32 kali		32 kali		32 kali		32 kali		160 kali				
				3. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	0 kali	0 kali	450 kali		450 kali		450 kali		450 kali		450 kali		2250 kali				
		3.3.2.3.1.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 paket	0 paket	7 paket	59,250,000	7 paket	59,250,000	7 paket	59,250,000	7 paket	59,250,000	7 paket	59,250,000	35 paket	296,250,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 paket	0 paket	27 paket		27 paket		27 paket		27 paket		27 paket		135 paket			
		3.3.2.3.1.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara	0 unit	0 unit	14 unit	200,000,000	14 unit	200,000,000	14 unit	200,000,000	14 unit	200,000,000	14 unit	200,000,000	70 unit	1,000,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah bulan pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 bulan	0 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan			
		3.3.2.3.1.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 unit	0 unit	22 unit	900,000,000	22 unit	900,000,000	22 unit	900,000,000	22 unit	900,000,000	22 unit	900,000,000	110 unit	4,500,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	0 unit	0 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		35 unit			
				3. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	0 unit	0 unit	113 unit		151 unit		151 unit		151 unit		151 unit		151 unit			
				4. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0 unit	0 unit	16 unit		16 unit		16 unit		16 unit		16 unit		80 unit			
		3.3.2.3.1.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/ Rumah Dinas/ Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0 paket	0 paket	15 paket	0	15 paket	0	15 paket	0	15 paket	0	15 paket	0	75 paket	0	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		3.3.2.3.1.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1. Frekuensi pembinaan ASN	0 tahun	0 tahun	1 tahun	50,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	50,000,000	1 tahun	50,000,000	5 tahun	250,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah ASN yang dibina	0 orang	0 orang	297 orang		297 orang		297 orang		297 orang		297 orang		297 orang			
				3. Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	0 orang	0 orang	75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang		75 orang			
		3.3.2.3.1.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	0%	0%	100%	102,576,000	100%	102,576,000	100%	102,576,000	100%	102,576,000	100%	102,576,000	100%	512,880,000		
		3.3.2.3.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Jumlah kegiatan yang dikelola	0 kegiatan	0 kegiatan	51 kegiatan	72,576,000	51 kegiatan	72,576,000	51 kegiatan	72,576,000	51 kegiatan	72,576,000	51 kegiatan	72,576,000	51 kegiatan	362,880,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah laporan keuangan yang tersusun	0 laporan	0 laporan	6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		30 laporan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.3.2.3.1.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	10,000,000	0 dokumen	10,000,000	0 dokumen	10,000,000	0 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	2 dokumen	50,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		6 dokumen			
		3.3.2.3.1.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	25 dokumen	50,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan
				2. Jumlah dokumen monitoring , evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		24 dokumen			
				3. Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		18 dokumen			
				4. Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		2 dokumen			
				5. Jumlah profil perangkat daerah yang tersusun	- dokumen	- dokumen	- dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		3.3.2.3.1.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	1. Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	5 dokumen	50,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan
				2. Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				3. Jumlah Daftar Informasi Publik	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				4. Jumlah dokumen pengendalian intern yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				5. Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				6. Jumlah dokumen peraturan bidang pertanian dan pangan yang disusun	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
		3.3.2.3.1.1.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1. Produktivitas padi	63,71 kw/ha	60,10 kw/ha	60,2 kw/ha	3,310,609,000	60,3 kw/ha	3,312,609,000	60,4 kw/ha	3,314,609,000	60,5 kw/ha	3,316,609,000	60,6 kw/ha	3,318,609,000	60,6 kw/ha	16,573,045,000		
				2. Produktivitas	59,28 kw/ha	59,30 kw/ha	59,31 kw/ha		50,32 kw/ha		59,33 kw/ha		59,34 kw/ha		59,35 kw/ha		59,35 kw/ha			
				3. Produktivitas kopi	8,85 kw/ha	8,90 kw/ha	8,95 kw/ha		9,00 kw/ha		9,05 kw/ha		9,10 kw/ha		9,15 kw/ha		9,15 kw/ha			
				4. Produktivitas cabai	69,69 kw/ha	69,74 kw/ha	69,80 kw/ha		69,85 kw/ha		69,90 kw/ha		69,96 kw/ha		70,01 kw/ha		70,01 kw/ha			
				5. Produktivitas bawang putih	61,27 kw/ha	61,42 kw/ha	61,57 kw/ha		61,72 kw/ha		61,87 kw/ha		62,02 kw/ha		62,18 kw/ha		62,18 kw/ha			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.3.2.3.1.1.19.82	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek	1. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana tanaman anggrek	Na unit (greenhouse)	30 unit (greenhouse)	- unit (greenhouse)	150,000,000	1 unit (greenhouse)	150,000,000	1 unit (greenhouse)	150,000,000	1 unit (greenhouse)	150,000,000	1 unit (greenhouse)	150,000,000	4 unit (greenhouse)	750,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah bibit tanaman anggrek spesies yang dibudidayakan	1113 batang	0 batang	70 batang		70 batang		70 batang		70 batang		70 batang		350 batang			
				3. Jumlah bibit tanaman anggrek kultur in vitro yang dibudidayakan	717 botol	0 botol	500 botol		500 botol		500 botol		500 botol		500 botol		2500 botol			
				4. Jumlah bibit tanaman hias yang dibudidayakan	0 batang	0 batang	100 batang		100 batang		100 batang		100 batang		100 batang		500 batang			
		3.3.2.3.1.1.19.83	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)	1. Jumlah bantuan pupuk yang disalurkan ke kelompok tani	0 kelompok tani	0 kelompok tani	10 kelompok tani	500,000,000	10 kelompok tani	500,000,000	10 kelompok tani	500,000,000	10 kelompok tani	500,000,000	10 kelompok tani	500,000,000	50 kelompok tani	2,500,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah pemuliaan varietas tembakau	0 varietas	0 varietas	1 varietas		1 varietas		1 varietas		1 varietas		1 varietas		1 varietas			
		3.3.2.3.1.1.19.84	Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT)	1. Jumlah bibit kopi yang tersalurkan	0 batang	0 batang	26300 batang	740,609,000	26300 batang	740,609,000	26300 batang	740,609,000	26300 batang	740,609,000	26300 batang	740,609,000	131500 batang	3,703,045,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah bibit teh yang tersalurkan	0 batang	0 batang	7000 batang		7000 batang		7000 batang		7000 batang		7000 batang		35000 batang			
				3. Jumlah bibit cengkeh yang tersalurkan	0 batang	0 batang	9400 batang		9400 batang		9400 batang		9400 batang		9400 batang		47000 batang			
		3.3.2.3.1.1.19.85	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT)	1. Jumlah bibit kelapa yang tersalurkan	0 batang	0 batang	8200 batang	300,000,000	10000 batang	300,000,000	10000 batang	300,000,000	10000 batang	300,000,000	10000 batang	300,000,000	48200 batang	1,500,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah bibit lada yang tersalurkan	0 batang	0 batang	13800 batang		9000 batang		9000 batang		9000 batang		9000 batang		49800 batang			
		3.3.2.3.1.1.27	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	1. Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang terjalin	0%	0%	20%	2,470,000,000	20%	2,470,000,000	20%	2,470,000,000	20%	2,470,000,000	20%	2,470,000,000	100%	12,350,000,000		
				2. Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik	4.14%	4.58%	5.01%		5.45%		5.89%		6.32%		6.76%		6.76%			
		3.3.2.3.1.1.27.1	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan	1. Jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen Padi	0 unit	0 unit	9 unit	400,000,000	10 unit	400,000,000	10 unit	400,000,000	10 unit	400,000,000	10 unit	400,000,000	49 unit	2,000,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP)	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3. jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen jagung	0 unit	0 unit	7 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		11 unit			
				4. jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP)	0 paket	0 paket	0 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		4 paket			
				5. jumlah pembinaan kelompok tani organik tanaman pangan	0 kelompok	0 kelompok	1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		5 kelompok			
		3.3.2.3.1.1.27.2	Penengkingkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura	1. Jumlah sosialisasi /Bimtek GHP buah dan Florikultura	0 paket	0 paket	2 paket	200,000,000	2 paket	200,000,000	2 paket	200,000,000	2 paket	200,000,000	2 paket	200,000,000	10 paket	1,000,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen buah dan flori	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket			
		3.3.2.3.1.1.27.3	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	1. jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat	0 paket	0 paket	2 paket	250,000,000	2 paket	250,000,000	2 paket	250,000,000	2 paket	250,000,000	2 paket	250,000,000	10 paket	1,250,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. jumlah bintek pengelolaan pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat	0 paket	0 paket	2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		10 paket			
				3. Jumlah pendampingan sertifikasi organik tanaman sayuran dan tanaman obat	0 kelompok	0 kelompok	1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		5 kelompok			
		3.3.2.3.1.1.27.4	Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (DBHCHT)	Jumlah pengadaan alat pasca panen tembakau	0 kelompok	0 kelompok	10 kelompok	495,000,000	10 kelompok	495,000,000	10 kelompok	495,000,000	10 kelompok	495,000,000	10 kelompok	495,000,000	50 kelompok	2,475,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		3.3.2.3.1.1.27.5	Gelar Promosi Produk Pertanian Unggulan	1. Jumlah penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan, temu usaha dan pameran hasil penyuluhan pertanian	0 kali	0 kali	4 kali	250,000,000	4 kali	250,000,000	4 kali	250,000,000	4 kali	250,000,000	4 kali	250,000,000	20 kali	1,250,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah fasilitasi pemasaran hasil lewat online shop	0 kali	0 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 kali			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		2024	2024		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.3.2.3.1.1.28.3	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktural Pertanian (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang dibangun	0 paket	0 paket	25 paket	4,875,999,816	25 paket	4,875,999,816	25 paket	4,875,999,816	25 paket	4,875,999,816	25 paket	4,875,999,816	125 paket	24,379,999,080	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		3.3.2.3.1.1.28.4	Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian	1. Jumlah pengadaan alat mesin pertanian 2. Jumlah bimbingan pengelolaan alsin/UPJA 3. Jumlah operasional brigade alsin	0 paket	0 paket	1 paket	645,267,334	1 paket	645,267,334	1 paket	645,267,334	1 paket	645,267,334	1 paket	645,267,334	5 paket	3,226,336,670	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		3.3.2.3.1.1.28.5	Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Jumlah pengadaan obat-obatan pengendali hama penyakit	1 paket	1 paket	1 paket	150,000,000	1 paket	150,000,000	1 paket	150,000,000	1 paket	150,000,000	1 paket	150,000,000	6 paket	750,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		3.3.2.3.1.1.28.6	Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk	1. Jumlah pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan pupuk 2. Jumlah distributor dan penyalur pupuk yang dibina	0 kelompok tani	0 kelompok tani	20 kelompok tani	50,000,000	20 kelompok tani	50,000,000	20 kelompok tani	50,000,000	20 kelompok tani	50,000,000	20 kelompok tani	50,000,000	100 kelompok tani	250,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		3.3.2.3.1.1.28.7	Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	jumlah pengadaan alat mesin perkebunan	34 unit	Na unit	20 unit	500,000,000	20 unit	500,000,000	20 unit	500,000,000	20 unit	500,000,000	20 unit	500,000,000	100 unit	2,500,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		3.3.2.3.1.1.28.8	Pembiayaan Pertanian	1. Jumlah asuransi usaha tani 2. Jumlah permodalan usaha tani	0 Ha	0 Ha	2500 Ha	126,000,000	2500 Ha	126,000,000	2500 Ha	126,000,000	2500 Ha	126,000,000	2500 Ha	126,000,000	2500 Ha	630,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		3.3.2.3.1.1.29	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	0 PERSEN	0 PERSEN	36,25 PERSEN	1,401,250,000	37,60 PERSEN	1,401,250,000	40,01 PERSEN	1,401,250,000	42,15 PERSEN	1,401,250,000	44,50 PERSEN	1,401,250,000	44,50 PERSEN	7,006,250,000		
		3.3.2.3.1.1.29.1	Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	1. Jumlah penyusunan, pengumpulan dan updating data kelembagaan tani 2. Jumlah penumbuhan, pengembangan, dan penguatan kapasitas kelembagaan tani (LKM, P4S, KTNA, Kelompok Tani, Gapoktan dan KTNA)	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	1 dokumen	300,000,000	5 dokumen	1,500,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		2024	2024		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				3. Jumlah penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan (Posluhdes, BPP)	0 lembaga	0 lembaga	1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		5 lembaga			
				4. Jumlah kerjasama yang terjalin antara penyuluh dengan lembaga litbang pertanian	0 kerjasama	0 kerjasama	1 kerjasama		1 kerjasama		1 kerjasama		1 kerjasama		1 kerjasama		5 kerjasama			
				5. Jumlah penilaian kelas kelompok tani (Pemula, Lanjut, Madya, Utama)	0 kelas	0 kelas	4 kelas		4 kelas		4 kelas		4 kelas		4 kelas		20 kelas			
		3.3.2.3.1.1.29.3	Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan	jumlah dokumen programa penyuluhan yang disusun	22 dokumen	22 dokumen	22 dokumen	150,000,000	22 dokumen	150,000,000	22 dokumen	150,000,000	22 dokumen	150,000,000	22 dokumen	150,000,000	132 dokumen	750,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		3.3.2.3.1.1.29.4	Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian	1. Jumlah penyebaran informasi dan siaran radio	0 paket	0 paket	22 paket	200,000,000	22 paket	200,000,000	22 paket	200,000,000	22 paket	200,000,000	22 paket	200,000,000	22 paket	1,000,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah demplot BPP yang difasilitasi	0 BPP	0 BPP	21 BPP		21 BPP		21 BPP		21 BPP		21 BPP		21 BPP			
		3.3.2.3.1.1.29.5	Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilannya	0 orang	0 orang	700 orang	151,250,000	700 orang	151,250,000	700 orang	151,250,000	700 orang	151,250,000	700 orang	151,250,000	3500 orang	756,250,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		3.3.2.3.1.1.29.6	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian	1. Jumlah penyuluh pertanian pemerintah, swasta dan swadaya yang meningkatkan kapasitasnya	0 orang	0 orang	260 orang	500,000,000	260 orang	500,000,000	260 orang	500,000,000	260 orang	500,000,000	260 orang	500,000,000	1300 orang	2,500,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
				2. Jumlah penyuluh yang kompeten sesuai standar LSP	0 orang	0 orang	48 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		248 orang			
				3. jumlah laporan survey tingkat kepuasan petani thd layanan penyuluhan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				4. Jumlah pelatihan penyuluh di BPP	0 orang	0 orang	210 orang		210 orang		210 orang		210 orang		210 orang		1050 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3.3.2.3.1.1.29.7	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah peningkatan kapasitas lembaga petani tembakau	0 kelompok	0 kelompok	2 kelompok	100,000,000	2 kelompok	100,000,000	2 kelompok	100,000,000	2 kelompok	100,000,000	2 kelompok	100,000,000	2 kelompok	500,000,000	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
Jumlah								18,091,724,000		18,073,724,000		18,080,724,000		18,097,724,000		18,089,724,000		90,433,620,000		

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana pembangunan Kabupaten Magelang berdasarkan pada RPJMD 2019–2024 yang dijabarkan dalam berbagai program, diantaranya memuat pembangunan bidang pertanian dan pangan yang diindikasikan oleh suatu indikator kinerja. Setiap tahunnya indikator kinerja diuraikan secara bertahap, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Indikator Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Magelang pada kurun waktu 2019-2024. Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Pangan mengacu pada indikator RPJMD.

Adapun Indikator Kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang selama tahun 2019-2024 secara rinci akan disajikan dalam Tabel 7.1. dan Tabel 7.2 sebagai berikut :

**Tabel 7.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks angka (0-100)	76,32	77,37	78,42	79,47	80,52	81,57	82,62	82,62
1.1	Ketersediaan pangan utama beras	kg/jiwa/tahun	212,65	211,91	211,22	210,66	210,10	209,55	208,99	208,99
1.2	Skor Pola Pangan Harapan	Indeks angka (0-100)	87,9	87,95	87,98	88	88,1	88,25	88,4	88,4
1.3	Stabilitas harga pangan	%	93,95	93,96	93,97	93,98	94	94,15	94,3	94,3
2	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	milyar rupiah	6.622,23*	6.997,70	7.373,16	7.748,63	8.124,10	8.499,56	8.875,03	8.875,03
2.1	Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,5
2.2	Produksi bawang putih	ton (askip)	2.053,50	2.156,20	2.264,00	2.377,20	2.424,70	2.473,20	2.522,70	2.522,70
2.3	Produksi cabai	ton (segar)	21.112,40	21.534,60	39.457	40.071	40.399	40.783	41.183	41.183
2.4	Produksi cengkeh	ton (bunga kering)	161	163	165	167	169	171	173	173
2.5	produksi jagung	ton (pipilan kering)	51.446	51.448	51.450	51.500	51.550	51.600	51.650	51.650
2.6	Produksi jeruk	kwintal (segar)	2.646	2.650	2.655	2.660	2.665	2.670	2.675	2.675
2.7	Produksi kelapa dalam	ton (kopra)	7.520	7.525	7.530	7.535	7.540	7.545	7.550	7.550
2.8	Produksi kelengkeng	ton (segar)	88	90	93	95	97	99	100	100
2.9	Produksi kopi	ton (ose kering)	1.468	1.480	1.490	1.500	1.510	1.520	1.530	1.530
2.10	Produksi Padi	ton (GKP)	478.199	478.300	478.500	479.000	479.500	480.000	480.500	480.500
2.11	Produksi salak	ton (segar)	69.362	69.372	69.380	69.390	69.400	69.410	69.420	69.420

**Tabel 7.2. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Cakupan peningkatan sarana prasarana aparatur	%	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	cakupan pelayanan administrasi PAK	%	100	100	0	0	0	0	0	0
4	Cakupan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	0	0	0	0	0	100
5	Ketersediaan energi per kapita	Kkal	3070	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
6	Ketersediaan protein per kapita	gram	77,93	51,3	53	53	53	53	53	53
7	Penguatan cadangan pangan	%	76,70	64,00	65	65	65	65	65	65
8	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	87,9	87,5	87,9	88,2	88,4	88,6	88,8	88,8
9	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	92,78	89	90	90	90	90	90	90
10	Penanganan daerah rawan pangan	%	65,7	67,1	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
11	Ketersediaan informasi pasokan. harga dan akses pangan di daerah	%	93,1	90	91	91	91	91	91	91
12	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	93,95	93,1	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
13	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	%	0	0	100	100	100	100	100	100
15	Nilai Tukar Petani	indeks	106,46	106,5	NA	NA	NA	NA	NA	NA
16	Jumlah kerjasama/ kemitraan pertanian antara lembaga petani dengan swasta atau pemerintah	kemitraan	6	6	0	0	0	0	0	6
17	Cakupan ketersediaan alsintan	%	1,8	1,8	NA	NA	NA	NA	NA	NA
18	jumlah produksi bibit tanaman hias/anggrek	m2	500	500	NA	NA	NA	NA	NA	NA
19	Pengelolaan hasil pertanian yang bermutu, berdaya saing dan aman dikonsumsi	kelompok	5	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20	Persentase penyuluh yang menyebarluaskan teknologi anjuran	%	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA
21	Produktivitas padi	kw/ha	63,71	60,1	60,2	60,3	60,4	60,5	60,6	60,6
22	Produktivitas jagung	kw/ha	59,28	59,3	59,31	50,32	59,33	59,34	59,35	59,35
23	Produktivitas kopi	kw/ha	8,85	8,9	8,95	9,00	9,05	9,10	9,15	9,15
24	Produktivitas cabai	kw/ha	69,69	69,74	69,8	69,85	69,90	69,96	70,01	70,01

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
25	Produktivitas bawang putih	kw/ha	61,27	61,42	61,57	61,72	61,87	62,02	62,18	62,18
26	Produktivitas cengkeh	kw/ha	1,75	1,8	1,86	1,92	1,98	2,04	2,08	2,08
27	Produktivitas kelapa dalam	kw/ha	14,32	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,9	14,9
28	Produktivitas salak	kw/pohon	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,1
29	Produktivitas jeruk	kw/pohon	0,07	0,08	0,1	0,12	0,14	0,16	0,18	0,18
30	Produktivitas kelengkeng	kw/pohon	0,76	0,77	0,78	0,79	0,8	0,81	0,82	0,82
31	Persentase Cakupan bina kelompok petani	%	97	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA
32	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
33	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
34	Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang Terjalin	%	0	0	20	20	20	20	20	100
35	Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik	%	4,14	4,58	5,01	5,45	5,89	6,32	6,76	6,76
36	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	%	0	0	3,45	3,59	3,79	3,83	3,86	18,52
37	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	%	0	0	36,25	37,6	40,01	42,15	44,5	44,5

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, sehingga rencana kerja tahunan dinas sesuai sasaran program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan program dinas diharapkan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Peran stakeholder penting sebagai mitra yang dapat memberikan masukan, menilai/mengevaluasi kinerja serta dapat berperan langsung dalam pembangunan pertanian dan pangan.

Agar pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel, baik berupa laporan tahunan maupun laporan lima tahunan setelah berakhirnya pelaksanaan renstra tersebut. Dari laporan lima tahunan tersebut dapat dilihat keberhasilan Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan visi dan misinya.

Upaya mewujudkan Visi Kabupaten Magelang **“Sejahtera, Maju, Berdaya Saing, dan Amanah”** tidaklah mudah dan hanya dapat terealisasi dengan tekad yang kuat dan integritas serta komitmen seluruh jajaran Perangkat Daerah dan dukungan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terkoordinasi dan sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang pada tingkat Rencana Kerja (Renja) masih dimungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan akibat adanya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan pertanian dan pangan. Program dan kegiatan dalam pencapaian target pelaksanaan Renstra 2019-2024 yang masih relevan dapat digunakan sebagai pijakan dalam penyusunan renstra berikutnya, sehingga masa transisi dalam penyusunan rencana kerja tahun 2020 dapat menggunakan beberapa indikator kegiatan dalam renstra 2019-2024.

Diharapkan seluruh target yang telah tercantum dalam Renstra 2019-2024 dapat dicapai oleh seluruh komponen Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang dengan memperhatikan segala sumberdaya yang ada baik internal maupun eksternal.

Kota Mungkid, Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. TRIAGUNG SUCAHYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19600625 198503 1 013

LAMPIRAN



S x

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Jalan Letnan Tukiyat, Kota Mungkid. Magelang 56511
Telp. (0293) 788314 Fax. (0293) 788314

Kota Mungkid, | April 2019

Nomor : 005 / 2420 / 20 / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada

Yth.

.....

.....

di

.....

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 4 April 2019

Waktu : 07.30 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat Distan dan Pangan Kab. Magelang

Acara : Forum Perangkat Daerah Rencana Strategis
Dinas Pertanian dan Pangan 2019-2024

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. TRIAGUNG SUCAHYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19600625 198503 1 013

BERITA ACARA
**HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH**
PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019-2024

Nomor : 050 / 2409 / 20/2019

Pada hari Kamis tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengarkan dan dan mempertimbangkan :

- a. Pemaparan Materi Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi, sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :
 - Hari dan Tanggal : Kamis, 4 April 2019
 - Jam : 09.00 s.d. selesai
 - Tempat : Ruang Pertemuan Distan dan PanganForum Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2024 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini;
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini;
- KELIMA** : Berita acara beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Kota Mungkid, 4 April 2019

Pit. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

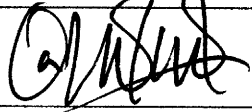

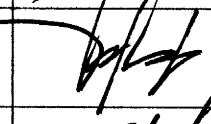
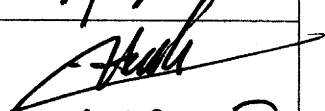



I. TRIAGUNG SUCAHYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19600625 198503 1 013

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.	Ani Tri Arh.	Bappeda & Litbang	Konbid PP	
2.	Purwanti. SA.	Disdagkep & UKM	Program	
3.	Eko Supriyadi	Kec. Grabag	Konbid prog. & Keuangan	
4.	Ahmad Saleh	ASAS'08'Padi	Ketua	
5.	Heni Setyaningrum	UMM	ICA LP3M	

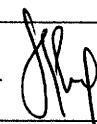


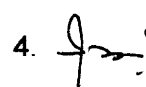

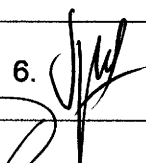
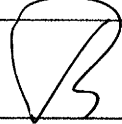
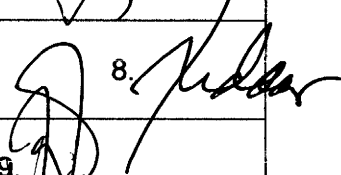

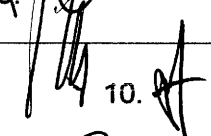
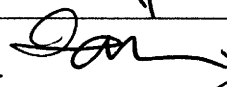
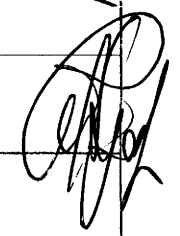
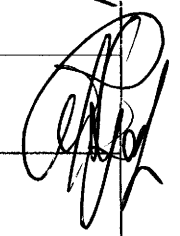
LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
 FORUM PERANGKAT DAERAH /
 LINTAS PERANGKAT DAERAH
 NOMOR : 050 / 2498 / 20 / 2019
 TANGGAL : 4 April 2019

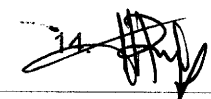

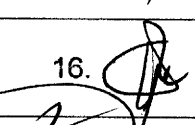

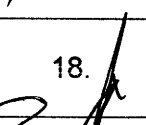

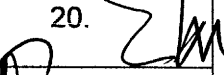

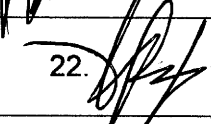
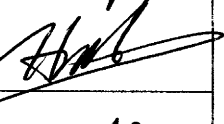
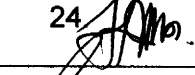
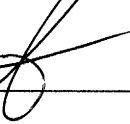
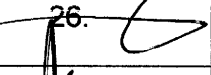


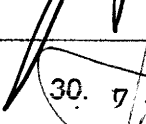
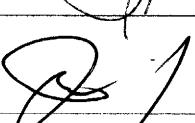
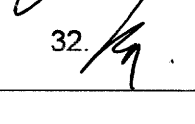

**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH
 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG**

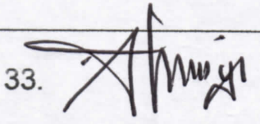
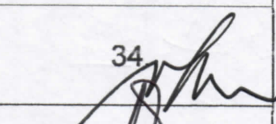
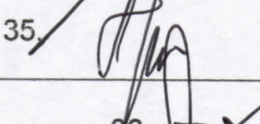
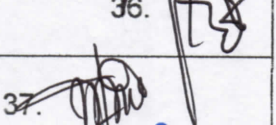
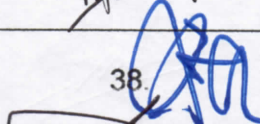
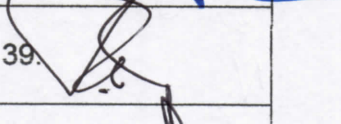
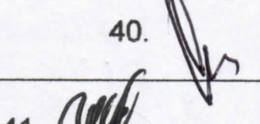
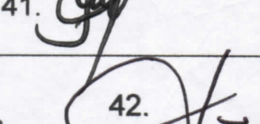

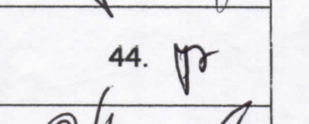
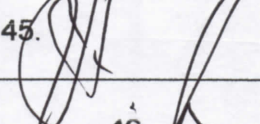
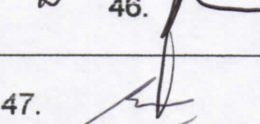
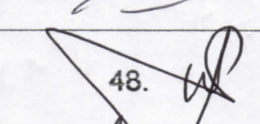
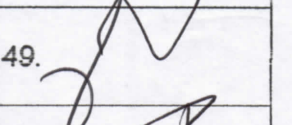
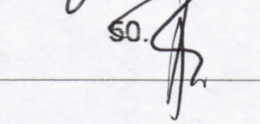



Hari, Tanggal : Kamis, 4 April 2019



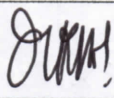
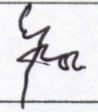
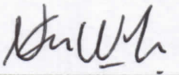

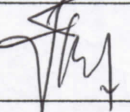
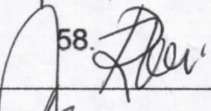

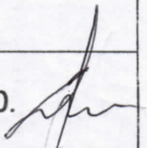
Pukul : 09.00 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat dan No. Telp.	Tanda Tangan
1.	Sri Rahayu	PP. Sawangan	081328709686	1. 
2.	Yudhanegara	BPP	08122770627	2. 
3.	Henri Setyanah	UMM	081227085056	3. 
4.	Historiawati	Unhidar	085727379310	4. 
5.	Ani Tri A	Bappan & Litbang	085719295207	5. 
6.	Subito	Distan Pang	081392464580	6. 
7.	Erizana	KJF Duta Dag	085293882995	7. 
8.	Ratumanan	Aisk & Pangan	085743315318	8. 
9.	Anas Kusuma	BPP Secang		9. 
10.	Susilma	BPP Gonty	081392521008	10. 
11.	F VAD	Kec PAKIS	082243820 AIC	11. 
12.	Amf Syarifudin	BPP Bondarjen	08124577303	12. 
13.	Heny M	DLH	081229838810	13. 


No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat dan No. Telp.	Tanda Tangan
14.	Sri Juliani	Distan Pagar	Kota Mukhid	14. 
15.	Sarwano	Bpp Dukun	085294580805	15. 
16.	Sulastri	BPP Salamun	082138293331	16. 
17.	Sutiman	Bpp pa us	08132827153	17. 
18.	M Sari sunyan	Distan spaga		18. 
19.	Gusmanan a	Kmp Tanjung		19. 
20.	Eko Widi	Dista		20. 
21.	Destri M	BPP Tegalarjo		21. 
22.	Aleo S	Kec. Probog	081226756231	22. 
23.	Almudal Farid	ASARIAN PADI	081578794469	23. 
24.	Mardani R.	BPP Sumbung	085762232015	24. 
25.	Widryat	BPP WINDHAN	085226371128	25. 
26.	Bp Heli	Distan Jn	0877102044	26. 
27.	Yoga Pusti	KAMPUNGAN	08156160090	27. 
28.	Sanet Elando	Kec. Pangau	085863029085	28. 
29.	Zoh Anis		081328713126	29. 
30.	Titik Sri W		08594378479	30. 
31.	DARMAWATI	WTMA	081215749972	31. 
32.	AKITIS	BPP SALUN	08122782320	32. 

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat dan No. Telp.	Tanda Tangan
33.	U. Setyawati	Kec. Borobudur		33. 
34.	Widuta	Dum Gpym		34. 
35.	Surajiman	BPP Candimulyo	Candimulyo	35. 
36.	S. Edi Priyanti	BPP Kojoran	Kojoran 081 320 368 288	36. 
37.	SRI Suhaini	BPP Borobudur	0852 2646 3503	37. 
38.	ZAFWAN	Kec. Candimulyo	0857 93 64 45	38. 
39.	Etawati Ladamah	Kec. Seag		39. 
40.	Pang	BPP - Ngoban		40. 
41.	Sejati	BPP Matiguh		41. 
42.	ARIS. M	Kec. Muntilan	085 201381362	42. 
43.	EDY SUSILO	BPP Kerting		43. 
44.	ARIS S	DPS Pa		44. 
45.	SRI KURNIA	Kec. Kariyang		45. 
46.	ROMA	BPP Pungur		46. 
47.	Purnanti SS	Diselagkap Gunung	0816 426 9089	47. 
48.	Ismael	Kec. Banteng	0813280 99692	48. 
49.	Slamet	BPP Muangkid	0856 2869 337	49. 
50.	Budi Setyo	Indah Pura		50. 

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat dan No. Telp.	Tanda Tangan
51.	Sagus I	Direktorat		51. 
52.	Sumantra	BPP Muntler		52. 
53.	Dian R. H	UPT Lab Pasmam		53. 
54.	Edy Ery I	Citay		54. 
55.	Nur Wahyu H	Distan Pangan	Magelang	55. 
56.	Zid. A	Distan Pangan		56. 
57.	Amis Pujiastatik	Distan Pangan		57. 
58.	Roswani	— —		58. 
59.	Rustam A	—		59. 
60.	Rokhmah	Distan Pangan		60. 

Pit. SEKRETARIS DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN
KABUPATEN MAGELANG




Ir. EKO WIDI HERMANTO
Pembina

NIP.19640802 199203 1 007

CASCADING RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG 2019-2024

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Strategi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Belum optimalnya ketahanan pangan	Ketersediaan pangan yang beragam kurang optimal	Produksi pangan yang fluktuatif Masih ada daerah rawan pangan	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama beras	(Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)/Jumlah Penduduk) x 100%	Tercukupinya ketersediaan pangan secara merata	
	Belum optimalnya cadangan pangan dan distribusi pangan	Masih rendahnya cadangan pangan daerah Masih rendahnya informasi pasokan, harga dan akses pangan				Stabilitas harga pangan	$\frac{2 - \text{realisasi harga rata - rata komoditas}}{\text{target harga rata - rata komoditas}} \times 100\%$		Tersedianya cadangan pangan dan distribusi yang merata
	Belum terpenuhinya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal				Skor Pola Pangan Harapan	$\frac{\text{konsumsi pangan ritil masyarakat}}{\text{standar konsumsi pangan nasional}} \times 100\%$		Pengekaragaman pangan, mutu pangan dan keamanan pangan

Masalah Pokok 1	Masalah 2	Akar Masalah 3	Isu Strategis 4	Tujuan 5	Sasaran 6	Indikator Sasaran 7	Formulasi 8	Strategi 9
		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan belum optimal						
Masih rendahnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani	Belum optimalnya produksi pertanian	Kepemilikan lahan pertanian relatif sempit	Belum optimalnya daya saing daerah	Meningkatnya daya saing daerah	Pengembangan produk pertanian (arti luas) berdaya saing dan keberagaman komoditas	Produksi Padi produksi jagung	Jumlah produksi padi dalam 1 tahun (ton GKP) Jumlah produksi jagung dalam 1 tahun (ton pipilan kering)	Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian
						Produksi cabai	Jumlah produksi cabai dalam 1 tahun (ton segar)	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Strategi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Masih rendahnya daya saing produk pertanian	Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian				Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	(produksi produk unggulan terstandarisasi : total produksi produk unggulan) x 100%	
		Masih rendahnya kerjasama/ kemitraan di bidang pertanian						

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Strategi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Belum optimalnya dukungan infrastruktur, permodalan, prasarana dan sarana pertanian						Meningkatkan jalinan kerja sama/kemitraan antara lembaga petani dengan pihak-pihak terkait

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Strategi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Belum optimalnya peranan dan pemberdayaan penyuluhan dalam pemberdayaan SDM						Meningkatkan peran penyuluhan dalam pemberdayaan SDM pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Strategi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pengembangan SDVI pertanian						

Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Formulasi	Kegiatan	Indikator Kegiatan
10	11	12	13	14	15
Terpenuhinya kebutuhan kalori dan protein masyarakat secara merata	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi per kapita	$\frac{\text{ketersediaan energi/kapita/hr(kkal)}}{2200 \text{ kkal}} \times 100\%$	Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1. Jumlah laporan analisa data Neraca Bahan Makanan (NBM)
		Ketersediaan protein per kapita	$\frac{\text{ketersediaan energi/kapita/hr(kkal)}}{2200 \text{ kkal}} \times 100\%$		2. Jumlah laporan analisis data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Tersedianya Sistem Pengawasan Pangan dan Gizi		Penanganan daerah rawan pangan	$\frac{\text{jumlah desa rawan pangan yang tertangani}}{\text{jumlah seluruh desa rawan pangan}} \times 100\%$	Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan	3. Jumlah peta daerah rawan pangan yang disusun
		Penguatan cadangan pangan	$\frac{\text{jenis cadangan pangan kabupaten (ton)}}{100 \text{ ton}} \times 100\%$		1. Jumlah pengembangan desa mandiri pangan
Tersedianya cadangan pangan yang mencukupi				Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	2. Jumlah dokumen kesepakatan Forum Dewan Ketahanan Pangan
Ketersediaan informasi dan akses pangan		Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	$\frac{\text{ketersediaan informasi komoditas, lokasi dan waktu}}{3} \times 100\%$	Pengembangan dan Penguatan Distribusi Pangan	Jumlah pengelolaan cadangan pangan daerah
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	$\frac{2 - \text{realisasi harga rata - rata komoditas}}{\text{target harga rata - rata komoditas}} \times 100\%$		1. Jumlah laporan analisis data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis
Percepatan penganeka ragam konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	$\frac{\text{konsumsi pangan riil masyarakat}}{\text{standar konsumsi pangan nasional}} \times 100\%$	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	2. Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yang produktif
					3. Jumlah hasil pemantuan lembaga distribusi pangan masyarakat yang terdampingi
					1. Jumlah laporan analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH)
					2. Jumlah pembinaan pemanfaatan pekarangan

Arah Kebijakan 10	Program 11	Indikator Program 12	Formulasi 13	Kegiatan 14	Indikator Kegiatan 15
					3. Jumlah peserta sosialisasi penyusunan menu B2SA
					4. Jumlah fasilitasi lomba/festival pangan
				Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)	Jumlah Kelompok yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan
Peningkatan Pengawasan, pembinaan mutu dan keamanan pangan		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	$\frac{\text{jumlah komoditas pangan yang aman}}{\text{jumlah sampel komoditas pangan}} \times 100\%$	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	1. jumlah dokumen hasil laporan uji kewanaman pangan
					2. Jumlah peserta pembinaan mutu dan keamanan pangan
Peningkatan nilai tambah produk pertanian	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Produktivitas padi	(Produksi padi (kwintal) : Luas panen tanaman padi(ha)) x 100%	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian	Jumlah produsen benih pertanian yang dibina
		2. Produktivitas jagung	(Produksi jagung (kwintal) : Luas panen tanaman jagung (ha)) x 100%	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1. Jumlah sarana produksi padi
					2. Jumlah SL GAP/SOP padi
					3. Jumlah sarana produksi jagung
					4. Jumlah SL GAP/SOP jagung
		3. Produktivitas cabai	(Produksi cabai (kwintal) : Luas panen tanaman cabai (ha)) x 100%	Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	1. Jumlah pembinaan penangkar benih tanaman
2. Jumlah penumbuhan penangkar benih tanaman unggulan					
3. Jumlah kebun dinas yang dikelola					
					1. Jumlah sarana produksi tanaman sayuran dan tanaman obat

Arah Kebijakan 10	Program 11	Indikator Program 12	Formulasi 13	Kegiatan 14	Indikator Kegiatan 15
		4. Produktivitas bawang putih	(Produksi bawang putih (kwintal) : Luas panen tanaman bawang putih (ha)) x 100%		2. jumlah bimtek SL GAP/SOP tanaman sayuran dan tanaman obat
		5. Produktivitas kopi	(Produksi kopi (kwintal) : Luas panen tanaman kopi (ha)) x 100%	Pengembangan Tanaman Penyegar (DBHCHT)	1. Jumlah bibit kopi yang tersalurkan
		6. Produktivitas cengkeh	(Produksi cengkeh (kwintal) : Luas panen tanaman cengkeh (ha)) x 100%		2. Jumlah bibit teh yang tersalurkan
					3. Jumlah bibit cengkeh yang tersalurkan
					Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)
				Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan	2. Jumlah pemuliaan varietas tembakau
		7. Produktivitas kelapa dalam	(Produksi kelapa (kwintal) : Luas panen tanaman kelapa (ha)) x 100%	Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT)	1. Jumlah bibit kelapa yang tersalurkan
					2. Jumlah bibit lada yang tersalurkan
		8. Produktivitas salak	(Produksi salak (kwintal) : Luas panen tanaman salak (pohon)) x 100%	Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura	1. Jumlah sarana produksi tanaman buah
		9. Produktivitas jeruk	(Produksi jeruk (kwintal) : Luas panen tanaman jeruk (pohon)) x 100%		2. Jumlah SL GAP tanaman buah yang dilaksanakan
		10. Produktivitas kelengkeng	(Produksi kelengkeng (kwintal) : Luas panen tanaman keengkeng (pohon)) x 100%	Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek	1. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana tanaman anggrek
					2. Jumlah bibit tanaman anggrek spesies yang dibudidayakan
					3. Jumlah bibit tanaman anggrek kultur in vitro yang dibudidayakan

Arah Kebijakan 10	Program 11	Indikator Program 12	Formulasi 13	Kegiatan 14	Indikator Kegiatan 15
					4. Jumlah bibit tanaman hias yang dibudidayakan
Pengembangan sistem pertanian berwawasan lingkungan	Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik	(luas lahan pertanian bersertifikat organik (ha) / luas lahan pertanian keseluruhan (ha)) x 100%	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan	1. jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen Padi
					2. jumlah bimtek pengelolaan pasca panen padi (SL GHP)
					3. jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen jagung
					4. jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP) jagung
					5. jumlah pembinaan kelompok tani organik tanaman pangan
				Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura	1. Jumlah sosialisasi /Bimtek GHP buah dan Florikultura
					2. jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen buah dan flori
				Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	1. jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat
					2. jumlah bintek pengelolaan pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat
					3. Jumlah pendampingan sertifikasi organik tanaman sayuran dan tanaman obat
Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (DBHCHT)	Jumlah pengadaan alat pasca panen tembakau				

Arah Kebijakan 10	Program 11	Indikator Program 12	Formulasi 13	Kegiatan 14	Indikator Kegiatan 15
				Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar	1. Jumlah pengadaan alat pasca panen kopi 2. Jumlah luas lahan sertifikasi organik kopi
				Peningkatan Daya Saing Tanaman Tahunan dan Rempah	1. Jumlah pengadaan alat pasca panen kelapa 2. Jumlah luas sertifikasi tanaman kelapa
Meningkatkan jejaring agribisnis		Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang Terjalin	(jumlah kerjasama/kemitraan yang terjalin tahun n - jumlah kerjasama/kemitraan yang terjalin tahun n-1)/jumlah kerjasama/kemitraan yang terjalin tahun n-1) x 100%	Gelar Promosi Produk Pertanian Unggulan	1. Jumlah penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan, temu usaha dan pameran hasil penyuluhan pertanian 2. Jumlah fasilitasi pemasaran hasil lewat online shop 3. jumlah kerjasama lembaga pemasaran dan dengan lembaga tani 4. Jumlah lembaga ekonomi petani yang ditumbuhkan
				Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)	jumlah pembinaan kemitraan petani tembakau
				Penumbuhan Sentra Buah Lokal Mendukung Agrowisata (DBHCHT)	jumlah penumbuhan sentra buah lokal
Penyiapan dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana pertanian/perkebunan yang tersedia : jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan) x 100%	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah pembinaan kelompok P3A
				Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian	1. Jumlah jalan usaha tani yang dibangun 2. Jumlah jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan dan irigasi sumur tanah dangkal yang dibangun

Arah Kebijakan 10	Program 11	Indikator Program 12	Formulasi 13	Kegiatan 14	Indikator Kegiatan 15
					3. Jumlah dam parit yang dibangun
					4. Jumlah embung yang dibangun
					5. Jumlah fasilitasi pengelolaan hibah bansos
				Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang dibangun
				Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian	1. Jumlah pengadaan alat mesin pertanian
					2. Jumlah bimbingan pengelolaan alsin/ UPJA
					3. Jumlah operasional brigade alsin
				Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Jumlah pengadaan obat-obatan pengendali hama penyakit
				Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk	1. Jumlah pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan pupuk
					2. Jumlah distributor dan penyalur pupuk yang dibina
				Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	jumlah pengadaan alat mesin perkebunan
				Pembiayaan Pertanian	1. Jumlah asuransi usaha tani
					2. Jumlah permodalan usaha tani
Meningkatkan peran dan kapasitas penyuluh dalam pendampingan petani	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	(Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n / jumlah kelompok tani) x 100%	Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	1. Jumlah penyusunan, pengumpulan dan updating data kelembagaan tani

Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Formulasi	Kegiatan	Indikator Kegiatan
10	11	12	13	14	15
					2. Jumlah penumbuhan, pengembangan, dan penguatan kapasitas kelembagaan tani (LKM, P4S, KTNA, Kelompok Tani, Gapoktan dan KTNA)
					3. Jumlah penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan (Posluhdes, BPP)
					4. Jumlah kerjasama yang terjalin antara penyuluh dengan lembaga litbang pertanian
					5. Jumlah penilaian kelas kelompok tani (Pemula, Lanjut, Madya, Utama)
				Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan	jumlah dokumen programa penyuluhan yang disusun
				Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian	1. Jumlah penyebaran informasi dan siaran radio
					2. Jumlah demplot BPP yang difasilitasi
				Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilannya
				Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian	1. Jumlah penyuluh pertanian pemerintah, swasta dan swadaya yang meningkat kapasitasnya
					2. Jumlah penyuluh yang kompeten sesuai standar LSP

Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Formulasi	Kegiatan	Indikator Kegiatan
10	11	12	13	14	15
				Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)	3. jumlah laporan survey tingkat kepuasan petani thd layanan penyuluhan 4. Jumlah pelatihan penyuluh di BPP Jumlah peningkatan kapasitas lembaga petani tembakau

CASCADING RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN MAGELANG 2019-2024

Visi	Misi	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan Renstra	Formula Tujuan	Masalah Pokok Perangkat Daerah	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Formula Sasaran Perangkat Daerah	Masalah Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya paritas daya beli masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	$Y (j) = \sum$ <p>Indikator indeks ketahanan pangan ada 9 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari Persentase penduduk dibawah Garis Kemiskinan Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran Persentase rumah tangga tanpa akses listrik Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk Prevalence Balita Stunting 	Belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan	Ketersediaan pangan utama beras	(Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)/Jumlah Penduduk) x 100%	Ketersediaan pangan yang beragam kurang optimal	Tercukupinya ketersediaan pangan secara merata
								Stabilitas harga pangan	$\frac{2 - \text{realisasi harga rata - rata komoditas}}{\text{target harga rata - rata komoditas}} \times 100\%$	Belum optimalnya cadangan pangan dan distribusi pangan	Tersedianya cadangan pangan dan distribusi yang merata
								Skor Pola Pangan Harapan	$\frac{\text{konsumsi pangan riil masyarakat}}{\text{standar konsumsi pangan nasional}} \times 100\%$	Belum terpenuhinya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Penganekaragaman pangan, mutu pangan dan keamanan pangan

Visi	Misi	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan Renstra	Formula Tujuan	Masalah Pokok Perangkat Daerah	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Formula Sasaran Perangkat Daerah	Masalah Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9. Angka harapan hidup pada saat lahir 0.10						
	Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Belum optimalnya daya saing daerah	Meningkatnya daya saing daerah	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Perhitungan dari BPS	Masih rendahnya pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani	Pengembangan produk pertanian (arti luas) berdaya saing dan berwawasan lingkungan	Produksi Padi produksi jagung	Jumlah produksi padi dalam 1 tahun (ton GKP) Jumlah produksi jagung dalam 1 tahun (ton pipilan kering)	Belum optimalnya produksi pertanian	Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian
								Produksi cabai	Jumlah produksi cabai dalam 1 tahun (ton segar)		
								Produksi bawang putih	Jumlah produksi bawang putih dalam 1 tahun (ton askip)		
								Produksi kopi	Jumlah produksi kopi dalam 1 tahun (ton ose kering)		
								Produksi cengkeh	Jumlah produksi cengkeh dalam 1 tahun (ton bunga kering)		

Visi	Misi	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan Renstra	Formula Tujuan	Masalah Pokok Perangkat Daerah	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Formula Sasaran Perangkat Daerah	Masalah Perangkat Daerah	Strategi Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									kereng)		
								Produksi kelapa dalam	Jumlah produksi kelapa dalam 1 tahun (ton kopra)		
								Produksi salak	Jumlah produksi salak dalam 1 tahun (ton segar)		
								Produksi jeruk	Jumlah produksi jeruk dalam 1 tahun (kuintal segar)		
								Produksi kelengkeng	Jumlah produksi kelengkeng dalam 1 tahun (ton segar)		
								Persentase produk pertanian yang terstandarisasi	(produksi produk unggulan terstandarisasi : total produksi produk unggulan) x 100%		

Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah	Arah Kebijakan Umum	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan
13	14	15	16	17	18	19
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan energi per kapita	$\frac{\text{ketersediaan energi/kapita/hr(kkal)}}{2200 \text{ kkal}} \times 100\%$	Produksi pangan yang fluktuatif	Terpenuhinya kebutuhan kalori dan protein masyarakat secara merata	Analisis Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	1. Jumlah laporan analisa data Neraca Bahan Makanan (NBM)
	Ketersediaan protein per kapita	$\frac{\text{ketersediaan energi/kapita/hr(kkal)}}{2200 \text{ kkal}} \times 100\%$	Masih ada daerah rawan pangan			2. Jumlah laporan analisis data Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
	Penanganan daerah rawan pangan	$\frac{\text{jumlah desa rawan pangan yang tertangani}}{\text{jumlah seluruh desa rawan pangan}} \times 100\%$				3. Jumlah peta daerah rawan pangan yang disusun
	Penguatan cadangan pangan	$\frac{\text{jenis cadangan pangan kabupaten (ton)}}{100 \text{ ton}} \times 100\%$	Masih rendahnya cadangan pangan daerah	Tersedianya Sistem Pengawasan Pangan dan Gizi	Pembinaan dan Pengembangan Kemandirian Pangan	1. Jumlah pengembangan desa mandiri pangan 2. Jumlah dokumen kesepakatan Forum Dewan Ketahanan Pangan
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	$\frac{\text{ketersediaan informasi komoditas, lokasi dan waktu}}{3} \times 100\%$	Masih rendahnya informasi pasokan, harga dan akses pangan	Tersedianya cadangan pangan yang mencukupi	Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah	1. Jumlah laporan analisis data informasi alur distribusi dan harga pangan strategis
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	$\frac{2 - \text{realisasi harga rata - rata komoditas}}{\text{target harga rata - rata komoditas}} \times 100\%$				2. Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat yang produktif 3. Jumlah hasil pemantuan lembaga distribusi pangan masyarakat yang terdampingi
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	$\frac{\text{konsumsi pangan rti masyarakat}}{\text{standar konsumsi pangan nasional}} \times 100\%$	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal	Percepatan penganeka ragam konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1. Jumlah laporan analisis skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2. Jumlah pembinaan pemanfaatan pekarangan 3. Jumlah peserta sosialisasi penyusunan menu B2SA
						4. Jumlah fasilitasi lomba/festival pangan

Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah	Arah Kebijakan Umum	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	
13	14	15	16	17	18	19	
					Pengembangan Olahan Pangan Lokal Berbasis Agribisnis (DBHCHT)	Jumlah Kelompok yang melaksanakan pemanfaatan pekarangan	
	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	$\frac{\text{jumlah komoditas pangan yang aman}}{\text{jumlah sampel komoditas pangan}} \times 100\%$	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan belum optimal	Peningkatan Pengawasan, pembinaan mutu dan keamanan pangan	Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	1. jumlah dokumen hasil laporan uji keamanan pangan 2. Jumlah peserta pembinaan mutu dan keamanan pangan	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1. Produktivitas padi	(Produksi padi (kwintal) : Luas panen tanaman padi(ha)) x 100%	Kepemilikan lahan pertanian relatif sempit	Peningkatan nilai tambah produk pertanian	Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Produsen Benih Pertanian	Jumlah produsen benih pertanian yang dibina	
	2. Produktivitas jagung	(Produksi jagung (kwintal) : Luas panen tanaman jagung (ha)) x 100%			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1. Jumlah sarana produksi padi 2. Jumlah SL GAP/SOP padi 3. Jumlah sarana produksi jagung 4. Jumlah SL GAP/SOP jagung	
					Pengembangan Benih Tanaman Unggulan	1. Jumlah pembinaan penangkar benih tanaman unggulan 2. Jumlah penumbuhan penangkar benih tanaman unggulan 3. Jumlah kebun dinas yang dikelola	
						Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	1. Jumlah sarana produksi tanaman sayuran dan tanaman obat 2. jumlah bimtek SL GAP/SOP tanaman sayuran dan tanaman obat
							5. Produktivitas kopi
	6. Produktivitas cengkeh	(Produksi cengkeh (kwintal) : Luas panen tanaman cengkeh (ha)) x 100%			2. Jumlah bibit teh yang tersalurkan		

Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah	Arah Kebijakan Umum	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan
13	14	15	16	17	18	19
						3. Jumlah bibit cengkeh yang tersalurkan
					Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tembakau (DBHCHT)	1. Jumlah bantuan pupuk yang disalurkan ke kelompok tani 2. Jumlah pemuliaan varietas tembakau
					Peningkatan Produksi Tanaman Semusim Perkebunan	1. Jumlah pembinaan asosiasi petani tebu 2. Jumlah pengembangan tanaman vanili
	7. Produktivitas kelapa dalam	(Produksi kelapa (kwintal) : Luas panen tanaman kelapa (ha)) x 100%			Pengembangan Tanaman Tahunan dan Rempah (DBHCHT)	1. Jumlah bibit kelapa yang tersalurkan 2. Jumlah bibit lada yang tersalurkan
	8. Produktivitas salak	(Produksi salak (kwintal) : Luas panen tanaman salak (pohon)) x 100%			Pengembangan Tanaman Buah dan Florikultura	1. Jumlah sarana produksi tanaman buah 2. Jumlah SL GAP tanaman buah yang dilaksanakan
	9. Produktivitas jeruk	(Produksi jeruk (kwintal) : Luas panen tanaman jeruk (pohon)) x 100%				
	10. Produktivitas kelengkeng	(Produksi kelengkeng (kwintal) : Luas panen tanaman keengkeng (pohon)) x 100%			Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hias dan Anggrek	1. Jumlah penyediaan sarana dan prasarana tanaman anggrek 2. Jumlah bibit tanaman anggrek spesies yang dibudidayakan 3. Jumlah bibit tanaman anggrek kultur in vitro yang dibudidayakan 4. Jumlah bibit tanaman hias yang dibudidayakan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian	Persentase luas lahan pertanian yang disertifikasi organik	(luas lahan pertanian bersertifikat organik (ha) / luas lahan pertanian keseluruhan (ha)) x 100%	Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk pertanian	Pengembangan sistem pertanian berwawasan lingkungan	Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan	1. jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen Padi 2. jumlah bimtek pengelolaan pasca panen padi (SL GHP)

Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah	Arah Kebijakan Umum	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan	
13	14	15	16	17	18	19	
			Masih rendahnya kerjasama/ kemitraan di bidang pertanian			3. jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen jagung	
							4. jumlah bimtek pengelolaan pasca panen (SL GHP) jagung
							5. jumlah pembinaan kelompok tani organik tanaman pangan
						Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Buah dan Florikultura	1. Jumlah sosialisasi /Bimtek GHP buah dan Florikultura
							2. jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen buah dan flori
						Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat	1. jumlah peralatan, sarana dan prasarana pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat
							2. jumlah binteK pengelolaan pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat
							3. Jumlah pendampingan sertifikasi organik tanaman sayuran dan tanaman obat
						Peningkatan Daya Saing Tanaman Semusim Perkebunan (DBHCHT)	Jumlah pengadaan alat pasca panen tembakau
						Peningkatan Daya Saing Tanaman Penyegar	1. Jumlah pengadaan alat pasca panen kopi
						2. Jumlah luas lahan sertifikasi organik kopi	
					Peningkatan Daya Saing Tanaman Tahunan dan Rempah	1. Jumlah pengadaan alat pasca panen kelapa	
						2. Jumlah luas sertifikasi tanaman kelapa	

Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah	Arah Kebijakan Umum	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan
13	14	15	16	17	18	19
	Persentase Peningkatan Kerjasama/ Kemitraan yang Terjalin	(jumlah kerjasama/kemitraan yang terjalin tahun n - jumlah kerjasama/kemitraan yang terjalin tahun n-1)/jumlah kerjasama/kemitraan yang terjalin tahun n-1) x 100%		Meningkatkan jejaring agribisnis	Gelar Promosi Produk Pertanian Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penyelenggaraan gelar promosi produk unggulan, temu usaha dan pameran hasil penyuluhan pertanian 2. Jumlah fasilitasi pemasaran hasil lewat online shop 3. jumlah kerjasama lembaga pemasaran dan dengan lembaga tani 4. Jumlah lembaga ekonomi petani yang ditumbuhkan
					Pembinaan Kemitraan Petani Tembakau (DBHCHT)	jumlah pembinaan kemitraan petani tembakau
					Penumbuhan Sentra Buah Lokal Mendukung Agrowisata (DBHCHT)	jumlah penumbuhan sentra buah lokal
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana pertanian/perkebunan yang tersedia : jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan) x 100%	Belum optimalnya dukungan infrastruktur, permodalan, prasarana dan sarana pertanian	Penyiapan dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah pembinaan kelompok P3A
					Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produksi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah jalan usaha tani yang dibangun 2. Jumlah jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan dan irigasi sumur tanah dangkal yang dibangun 3. Jumlah dam parit yang dibangun 4. Jumlah embung yang dibangun 5. Jumlah fasilitasi pengelolaan hibah bansos
					Peningkatan Sarana, Prasarana dan Infrastrktuktur Pertanian (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur pertanian yang dibangun

Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah	Arah Kebijakan Umum	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan
13	14	15	16	17	18	19
					Modernisasi dan Mekanisasi Pertanian	1. Jumlah pengadaan alat mesin pertanian 2. Jumlah bimbingan pengelolaan alsin/ UPJA 3. Jumlah operasional brigade alsin
					Penyediaan Bufferstock Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Jumlah pengadaan obat-obatan pengendali hama penyakit
					Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Pupuk	1. Jumlah pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan pupuk 2. Jumlah distributor dan penyalur pupuk yang dibina
					Pengadaan Alat Mesin Perkebunan (DBHCHT)	jumlah pengadaan alat mesin perkebunan
					Pembiayaan Pertanian	1. Jumlah asuransi usaha tani 2. Jumlah permodalan usaha tani
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani	(Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n / jumlah kelompok tani) x 100%	Belum optimalnya peranan dan pemberdayaan penyuluhan dalam pengembangan SDM pertanian	Meningkatkan peran dan kapasitas penyuluh dalam pendampingan petani	Penumbuhan, Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Petani	1. Jumlah penyusunan, pengumpulan dan updating data kelembagaan tani 2. Jumlah penumbuhan, pengembangan, dan penguatan kapasitas kelembagaan tani (LKM, P4S, KTNA, Kelompok Tani, Gapoktan dan KTNA) 3. Jumlah penumbuhan, pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan (Posluhdes, BPP)
						4. Jumlah kerjasama yang terjalin antara penyuluh dengan lembaga litbang pertanian

Program	Indikator Program	Formula Indikator Program	Akar Masalah	Arah Kebijakan Umum	Nama Kegiatan	Indikator Kegiatan
13	14	15	16	17	18	19
						5. Jumlah penilaian kelas kelompok tani (Pemula, Lanjut, Madya, Utama)
					Penyusunan Program dan Programa Penyuluhan	jumlah dokumen programa penyuluhan yang disusun
					Fasilitasi Pelaksanaan Metode Penyuluhan Pertanian	1. Jumlah penyebaran informasi dan siaran radio
						2. Jumlah demplot BPP yang difasilitasi
					Peningkatan Kapasitas Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Jumlah pelaku utama dan pelaku usaha yang meningkat kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilannya
					Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Pertanian	1. Jumlah penyuluh pertanian pemerintah, swasta dan swadaya yang meningkat kapasitasnya
						2. Jumlah penyuluh yang kompeten sesuai standar LSP
						3. jumlah laporan survey tingkat kepuasan petani thd layanan penyuluhan
						4. Jumlah pelatihan penyuluh di BPP
					Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Tembakau (DBHCHT)	Jumlah peningkatan kapasitas lembaga petani tembakau